



Laporan Kinerja LPMP SULAWESI SELATAN TAHUN 2019

**Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Sulawesi Selatan**

📞 (0411) 873565, 873513

📠 (0411) 873513

🌐 lpmpsulsel.kemdikbud.go.id

✉️ lpmp.sulsel@kemdikbud.go.id

SAMBUTAN

KEPALA LPMP

Sulawesi Selatan



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Sulawesi Selatan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja Tahun 2019 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2019. Secara umum LPMP Sulawesi Selatan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, akan tetapi masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang.

Permasalahan tersebut antara lain belum terbangunnya budaya mutu pada satuan pendidikan, rendahnya komitmen penyelenggaran pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, dan terbatasnya kewenangan LPMP dalam melakukan intervensi langsung pada satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan SNP. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2019.

Makassar, 28 Januari 2019
Kepala LPMP Sulawesi Selatan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. H. Abdul Halim Muharram".

Drs. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd.
NIP 19640715 199403 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Singkatan	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. Capaian Kinerja Organisasi	7
B. Realisasi Anggaran	50
C. Efisiensi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Dokumen perjanjian kinerja	
2. Pengukuran kinerja	
3. Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran	
4. Penyataan telah direview	



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV

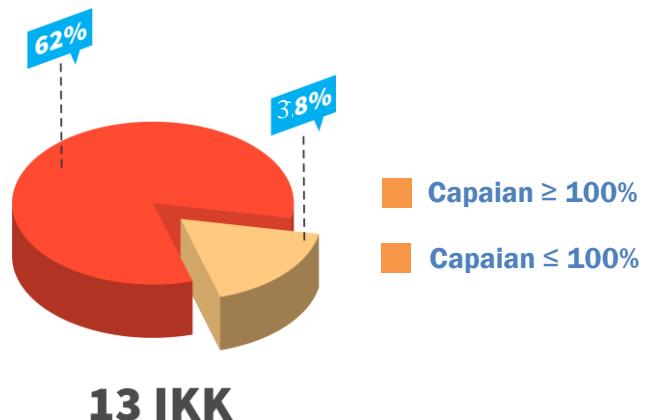
DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
FOPPSI	: Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
LPMP	: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
NPSN	: Nomor Pokok Sekolah Nasional
PK	: Perjanjian Kinerja
PMP	: Pemetaan Mutu Pendidikan
PTK	: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PPK	: Penguanan Pendidikan Karakter
Renstra	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RKS	: Rencana Kerja Sekolah
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SATGAS	: Satuan Tugas
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Sasaran Kegiatan
SD	: Sekolah Dasar
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPME	: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
TPMPD	: Tim Penjaminan Mutu Pemerintah Daerah
UN	: Ujian Nasional
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
ZI WBK	: Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
WBBM	: Wilayah Bersih Bebas Melayani

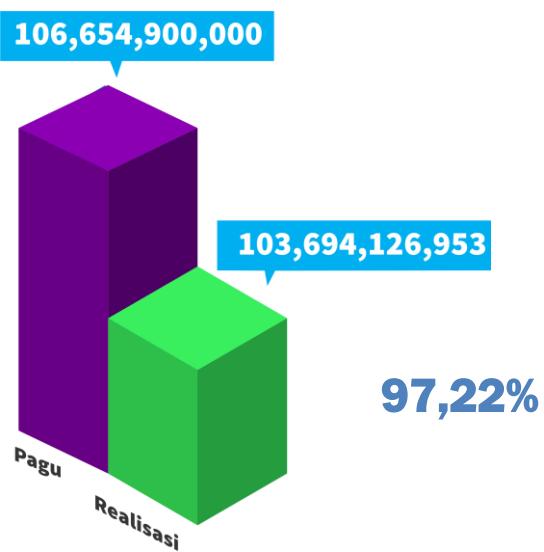
IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2019 ini merupakan laporan kinerja tahun kelima atas pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat capaian dua sasaran kegiatan dan 13 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III.

RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

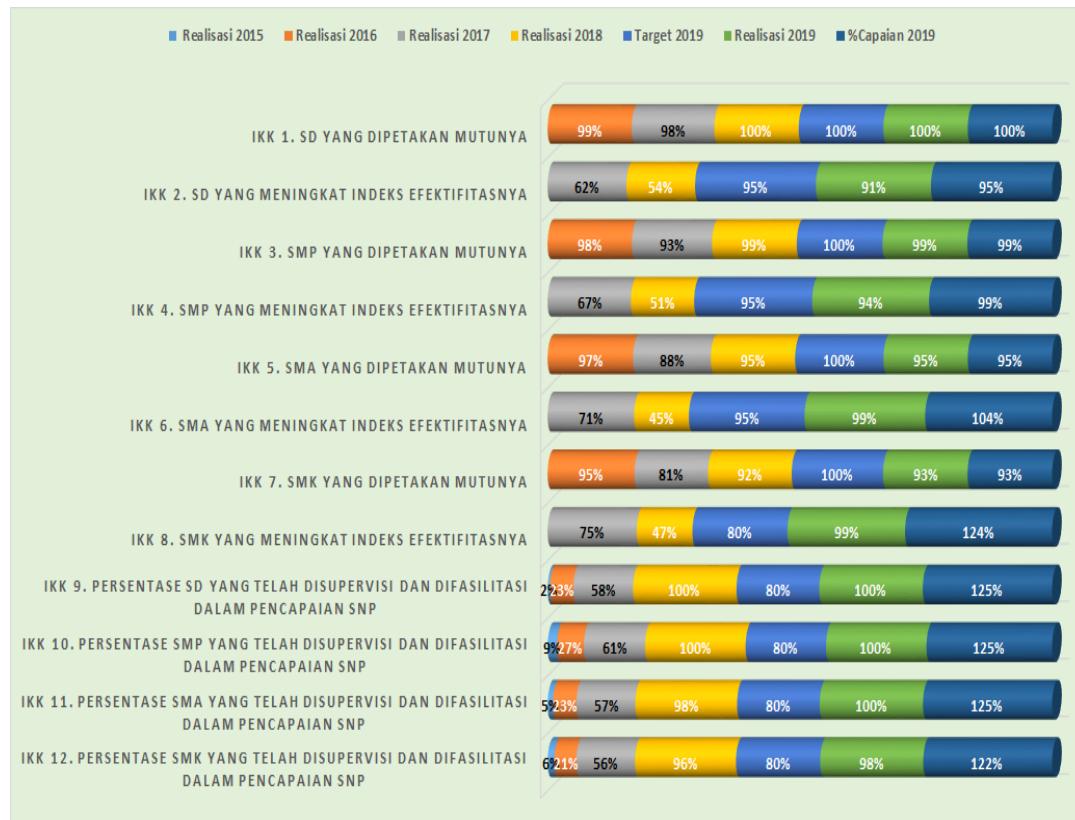


KINERJA ANGGARAN



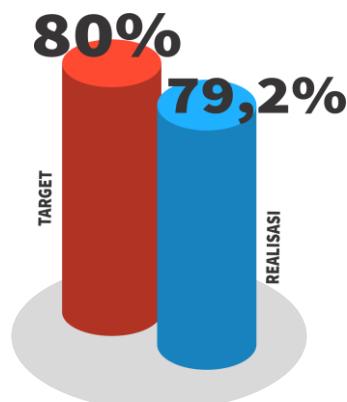
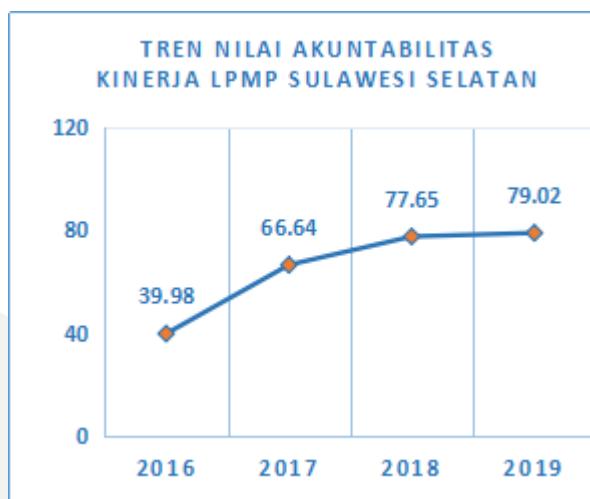
SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.



SASARAN KEGIATAN 2

Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik.



Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja antara lain:

1. Peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 SNP merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan namun LPMP Sulawesi Selatan sebagai UPT Kemdikbud tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi langsung pada pemenuhan seluruh Standar Nasional Pendidikan.
2. Aplikasi PMP yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data mutu satuan pendidikan yang dikembangkan oleh unit utama masih memiliki berbagai macam masalah seperti kapasitas server tidak memadai untuk menerima pengiriman data yang sangat banyak secara serentak, update versi yang dilakukan pada saat pengisian instrumen, jumlah responden PTK dan siswa tidak terpenuhi sesuai data Dapodik.
3. Beberapa satuan pendidikan masih terdaftar di Dapodik, padahal sudah tidak operasional lagi (tidak aktif/tutup), dan memiliki NPSN ganda. Kondisi ini mempengaruhi capaian satuan pendidikan yang berhasil dipetakan mutunya.
4. Adanya pengantian sekolah Binaan SPMI/Sekolah model jenjang SD dan SMP karena ditetapkan sebagai sekolah rujukan atau bermutu.
5. Kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan yang tidak mengizinkan satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK terlibat dalam program sekolah SPMI Binaan LPMP (Sekolah Model).
6. Rapor mutu belum sepenuhnya digunakan oleh satuan pendidikan untuk menyusun rencana pemenuhan mutu (RKA/RKT/RKS).

Berdasarkan permasalahan diatas, beberapa rekomendasi yang kami usulkan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

1. Mengoptimalkan komunikasi dan membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
2. Melakukan koordinasi dengan satgas PMP pusat dan memberikan saran bagi penyempurnaan sistem pengumpulan dan pengolahan data mutu pendidikan.

3. Mengusulkan penghapusan data satuan pendidikan yang tidak operasional lagi ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut.
4. Segera melakukan penggantian sekolah SPMI Binaan LPMP Sulawesi Selatan sesuai dengan usulan dan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten/kota..
5. Melakukan pengalihan kuota sekolah SPMI Binaan LPMP Sulawesi Selatan (sekolah model) dari jenjang SMA/SMK ke jenjang SD/SMP.
6. Meningkatkan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat rapor mutu untuk peningkatan mutu satuan pendidikan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan wilayah kerja meliputi 24 kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, Kepala LPMP Sulawesi Selatan dijabat oleh Dr. H. Abd. Halim Muhamram, M.Pd. yang dilantik pada tanggal 26 Januari 2016 berdasarkan SK Nomor:111/MPK/RHS/KP/2016.

Pendirian LPMP Sulawesi Selatan berawal dari peralihan fungsi Balai Penataran Guru (BPG) Ujung Pandang sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/0/2003 tertanggal 4 Juli 2003 tentang pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2005 diperbaharui lagi dengan Permendiknas RI No. 7 Tahun 2007 tentang Lembaga Pejaminan Mutu Pendidikan yang merubah kata “Penjamin” menjadi “Penjaminan”. Perubahan dari BPG menjadi LPMP berimplikasi pada perubahan tugas pokok dan fungsi, yakni dari lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan menjadi lembaga penjaminan mutu pendidikan.

LPMP Sulawesi Selatan memiliki ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 125 orang PNS dan 48 orang tenaga honorer. Dari 125 PNS terdapat tenaga fungsional tertentu sejumlah 24 orang, pejabat struktural 11 orang, dan fungsional umum 90 orang, dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) sebanyak 9 orang, Magister (S2) sebanyak 54 orang, Sarjana (S1) sebanyak 46 orang, Diploma Tiga (D3) sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 11 orang, SMP dan SD atau masing-masing sebanyak 2 orang.

B. Dasar Hukum

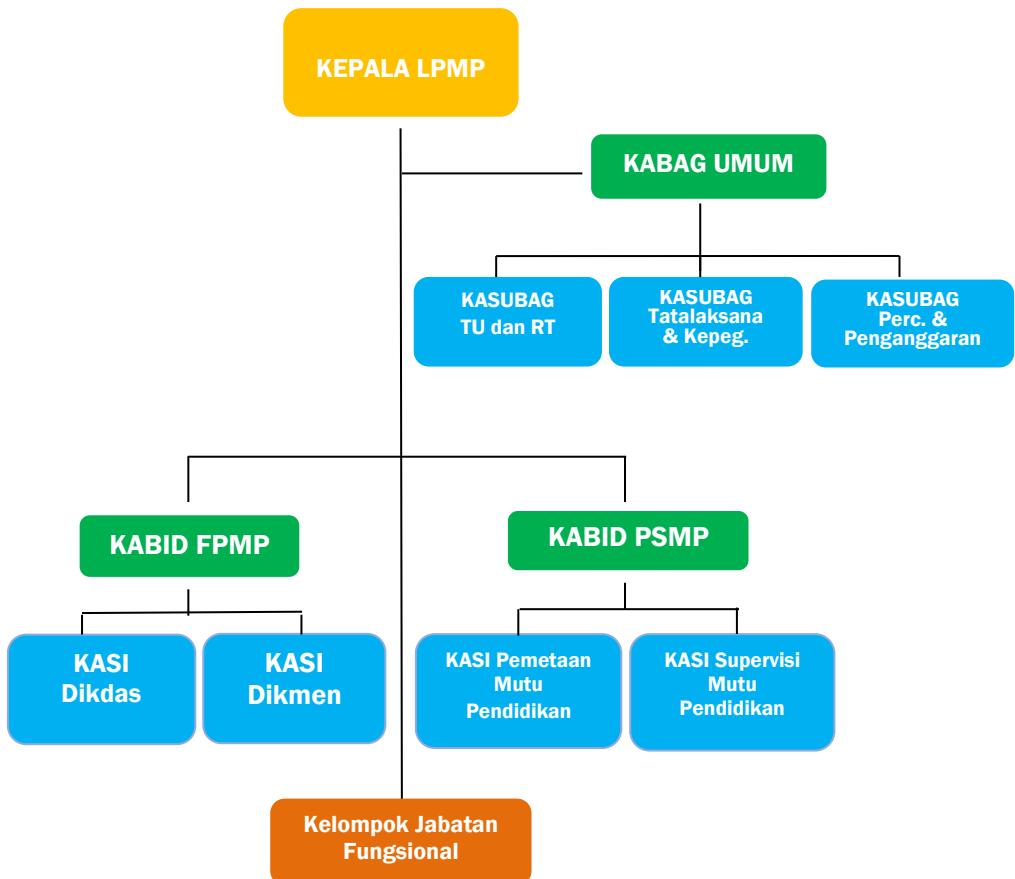
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan kemendikbud.
5. Permendikbud No. 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas LPMP Sulawesi Selatan adalah melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

D. Struktur Organisasi



E. Isu Strategis

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi LPMP Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah :

1. Berdasarkan Hasil pemetaan mutu Tahun 2019, belum ada satuan pendidikan (SD, SMP,SMA, SMK) di Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan.
2. Komitmen penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan belum merata baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat satuan pendidikan.

3. Hasil pemetaan mutu pendidikan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan untuk mengawal penjaminan mutu pendidikan.
4. Belum maksimalnya pelaksanaan fasilitasi pemenuhan mutu satuan pendidikan berdasarkan rencana pemenuhan mutu yang telah ditetapkan.
5. Hasil analisis dan rekomendasi mutu berdasarkan rapor mutu belum benar-benar ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
6. Belum optimalnya implementasi pembelajaran berorientasi kecakapan abad 21 pada satuan pendidikan.
7. Belum optimalnya Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada satuan pendidikan.
8. Pelibatan masyarakat kurang maksimal dalam peningkatan mutu pendidikan.
9. LPMP sebagai UPT Kemdikbud memberikan pemahaman dan melakukan pendampingan pelaksanaan SPMI pada satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan 8 SNP, namun pelaksanaan pemenuhannya tetap menjadi wewenang satuan pendidikan dan pemerintah daerahnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi



VISI

Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Standar Nasional Pendidikan yang Berlandaskan Semangat Gotong Royong di Provinsi Sulawesi Selatan



MISI

- Memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan
- Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan
- Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan
- Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan Strategis

Kode	Tujuan Strategis
TS1	Peningkatan capaian SNP satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan
TS2	Peningkatan efektifitas penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan
TS3	Sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
TS4	Penguatan tata kelola birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

C. Perjanjian Kerja

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2019

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	SD yang telah dipetakan mutunya	100%	10,651,088,000
2	SD yang meningkat indeks efektivitasnya	95%	
3	SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
4	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	95%	
5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
6	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	95%	
7	SMK yang telah dipetakan mutunya	100%	
8	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	95%	
9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	
10	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	
11	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	
12	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	

SASARAN KEGIATAN 2

Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sulawesi Selatan yang Baik.

No.	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
13	Nilai Minimal SAKIP LPMP Sulawesi Selatan	80	36,320,340,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2019, LPMP Sulawesi Selatan menetapkan dua sasaran kegiatan dengan 13 indikator kinerja untuk dicapai. Berikut uraian tingkat ketercapaian dari sasaran kegiatan beserta indikator kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2019.

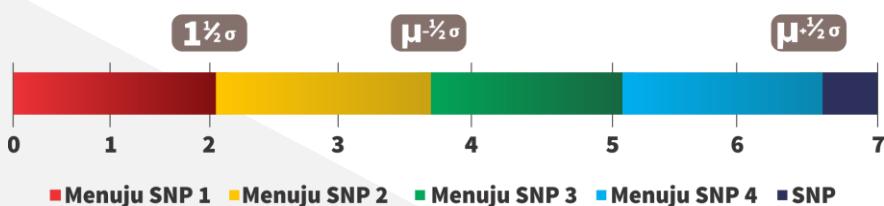
SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

Upaya LPMP Sulawesi Selatan meningkatkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dilakukan melalui kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi mutu satuan pendidikan, dan fasilitasi satuan pendidikan sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Dalam implementasinya, sejak tahun 2016, penjaringan data mutu pendidikan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dan Dapodik.

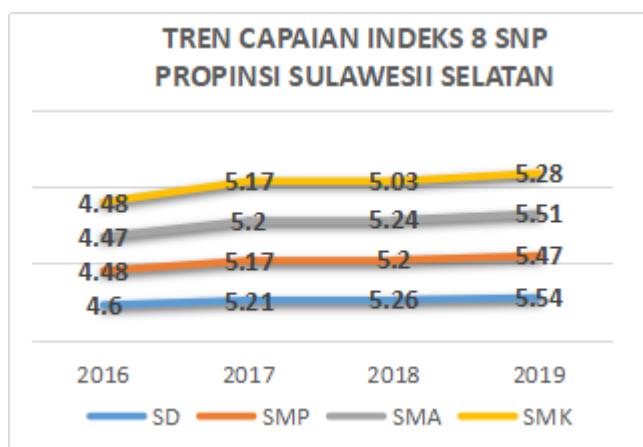
Berdasarkan hasil koordinasi dengan penanggung jawab pemetaan mutu pendidikan tingkat pusat, penghitungan realisasi hasil pemetaan mutu pendidikan tahun 2019 yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) satu sampai dengan delapan menggunakan rapor mutu hasil pengumpulan data tahun 2018 yang pengolahan datanya dilakukan pada bulan Februari hingga April 2019.

Pelaksanaan pengolahan dan analisis data hasil Pemetaan Mutu Pendidikan dilakukan dengan membuat rentang capaian SNP dengan menggunakan fungsi standar deviasi.



Sehingga rentang nilai capaian SNP yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Kategori	Baras Bawah	Batas Atas
Menuju SNP 1	0.00	2.04
Menuju SNP 2	2.04	3.70
Menuju SNP 3	3.70	5.06
Menuju SNP 4	5.06	6.66
SNP	6.66	7.00



Peningkatan penjaminan mutu pendidikan diukur dengan peningkatan skor/indeks capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil pemetaan mutu tahun 2019 menunjukkan bahwa kategori capaian SNP pada jenjang SD, SMP, dan SMA sama dengan kategori capaian tahun sebelumnya yaitu berada pada kategori “menuju SNP 4”. Sementara untuk jenjang SMK terdapat peningkatan kategori capaian dari “Menuju SNP 3” menjadi “Menuju SNP 4”. Meski demikian, terdapat peningkatan rerata skor capaian SNP pada semua jenjang.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan supervisi mutu pendidikan serta pemberian bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam upaya pemenuhan 8 SNP.

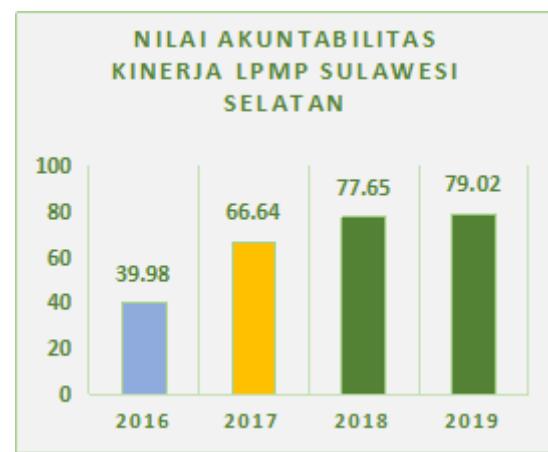
SASARAN KEGIATAN 2

Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sulawesi Selatan yang Baik.

Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik ditandai dengan peningkatan nilai/skor akuntabilitas kinerja dan penyerapan anggaran setiap tahunnya.

Untuk ketercapaian sasaran tersebut, beberapa upaya telah dilakukan antara lain: pengembangan sistem informasi penjaminan mutu berbasis daring (e-spmi), pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT), pembentukan tim ZI WBK dan tim SAKIP, optimalisasi peran Satuan Pengawas Internal (SPI) serta peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai kegiatan.

Ketercapaian sasaran kegiatan LPMP Sulawesi Selatan tahun 2019 dijabarkan melalui uraian capaian 13 indikator kinerja kegiatan berikut ini.

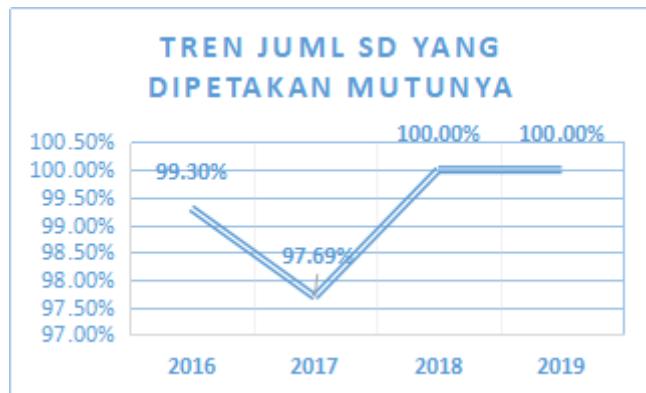


IKK 1. “SD yang telah dipetakan mutunya”

Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
97.69%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi indikator SD yang telah dipetakan mutunya pada tahun 2019 sama dengan capaian tahun sebelumnya. Dari target 6.434 SD, yang terealisasi sebesar 6.413. Sebanyak 10 sekolah tidak melakukan pemetaan karena sudah tidak

operasional lagi, tapi masih terdaftar di Dapodik dan beberapa sekolah



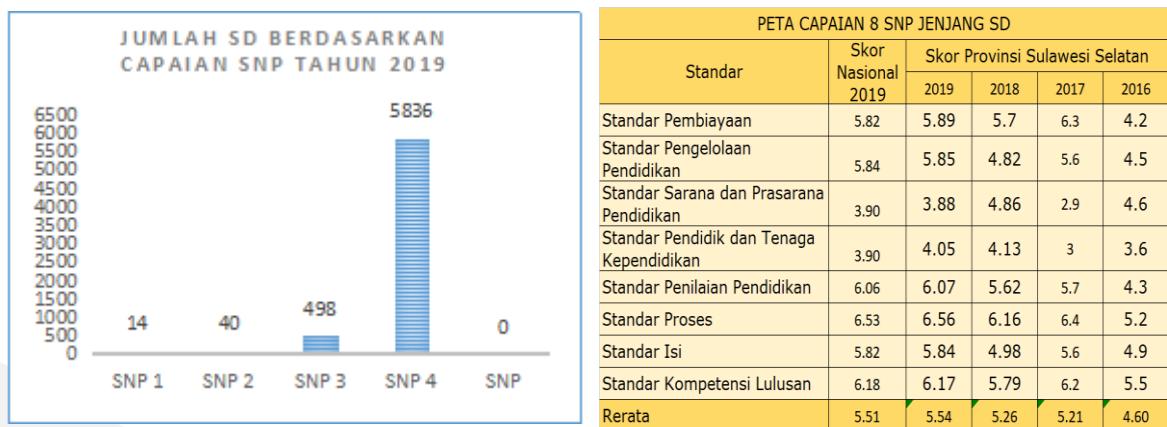
teridentifikasi memiliki NPSN ganda. Namun demikian, dari 6.413 SD yang melakukan pemetaan mutu melalui Aplikasi PMP, sebanyak 6.388 SD yang data rapor mutunya dapat diolah. Ini berarti terdapat peningkatan jumlah SD yang rapor mutunya dapat diolah dibanding tahun tahun 2018 yang hanya mencapai 4.913 sekolah.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) yang telah dipetakan mutunya antara lain:

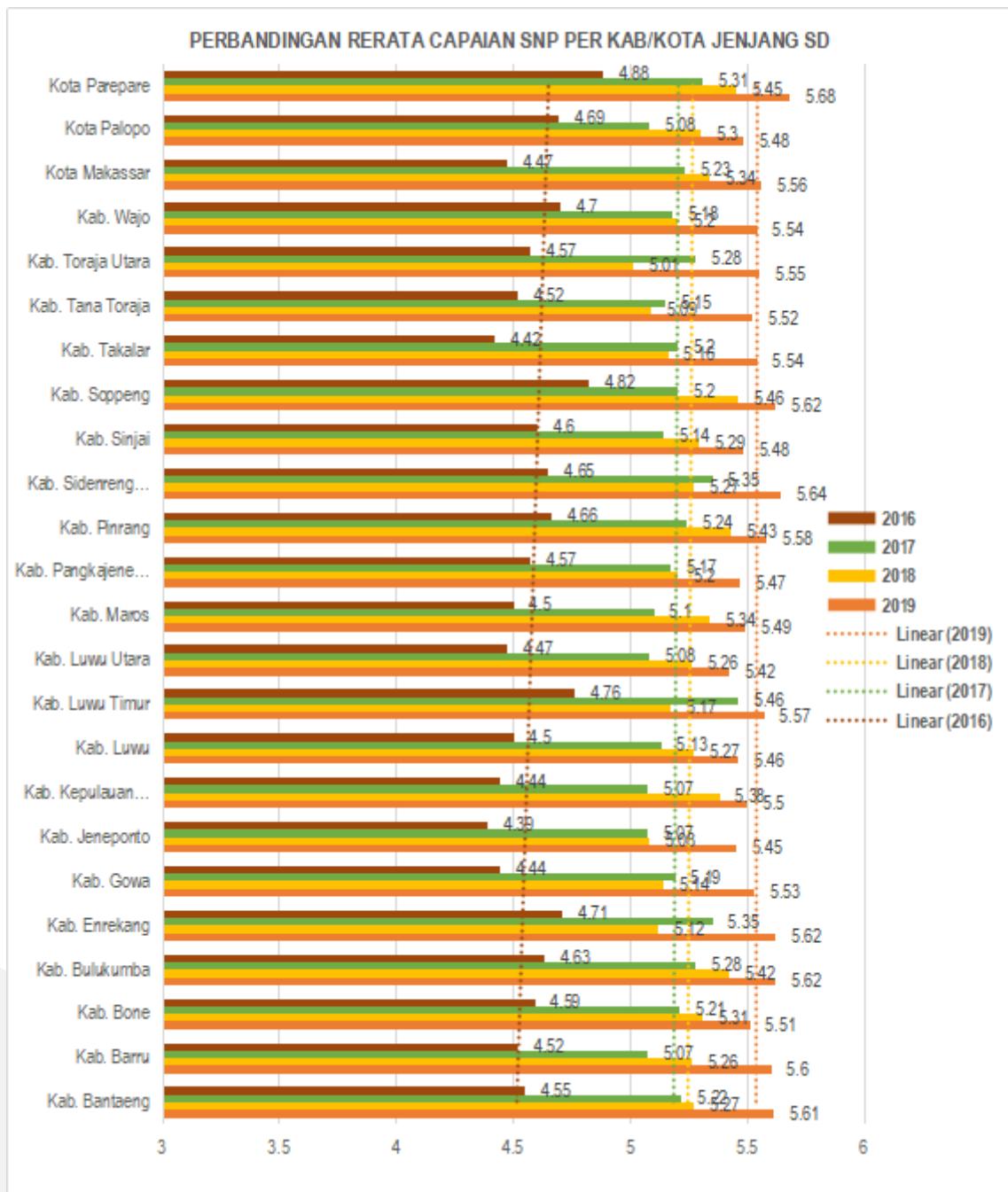
1. Mengoptimalkan peran pengawas sekolah dalam mengawal pemetaan mutu di sekolah binaan masing-masing, di antaranya dengan mewajibkan pengawas melakukan verifikasi dan validasi data hasil isian responden di aplikasi PMP.
2. Melakukan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ke sekolah, sebagai upaya pemahaman tentang pentingnya pemetaan mutu di sekolah.
3. Memaksimalkan fungsi sekretariat penjaminan mutu pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tergabung dalam Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) Provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
4. Memaksimalkan peran operator pendataan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dengan pelibatan pada beberapa kegiatan seperti Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan, Bimbingan Teknis Pengumpulan Data PMP, dan Koordinasi Pelaksanaan Pengumpulan Data Mutu Pendidikan, serta verifikasi data mutu pendidikan.
5. Pemberian penghargaan/reward bagi 10 kabupaten/kota dengan progress pengiriman data PMP tertinggi.
6. Terlaksananya semua tahapan kegiatan yang mendukung terlaksananya pemetaan mutu satuan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK berupa:
 - a. Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan yang melibatkan unsur Bupati, BAPPEDA, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan, dan satuan pendidikan.

- b. Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Pengumpulan Data yang diikuti 72 peserta yang akan melakukan bimtek dan pendampingan kepada pengawas pengumpul data mutu.
- c. Bimbingan Teknis Pengawas Pemetaan Mutu Pendidikan yang diikuti oleh 1.391 pengawas sekolah yang akan mendampingi satuan pendidikan dalam melakukan pemetaan mutu melalui aplikasi PMP.
- d. Pelaksanaan Pengumpulan Data Pemetaan Mutu Pendidikan oleh semua satuan pendidikan.
- e. Verifikasi dan Validasi Data Pemetaan Mutu Pendidikan dilaksanakan oleh pengawas terhadap sekolah binaannya masing-masing. Sementara LPMP melakukan verifikasi dan validasi secara acak terhadap 768 satuan pendidikan.
- f. Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu, Analisis Data Mutu, dan Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu. Hasil dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya profil mutu pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.
- g. Diseminasi Pemetaan Mutu yang melibatkan unsur Bupati, BAPPEDA, Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, Dewan Pendidikan, Pengawas sekolah dan satuan pendidikan dengan total peserta 146 orang.

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD TAHUN 2019



**Bimtek Pemetaan Mutu
pendidikan bagi pengawas
sekolah**



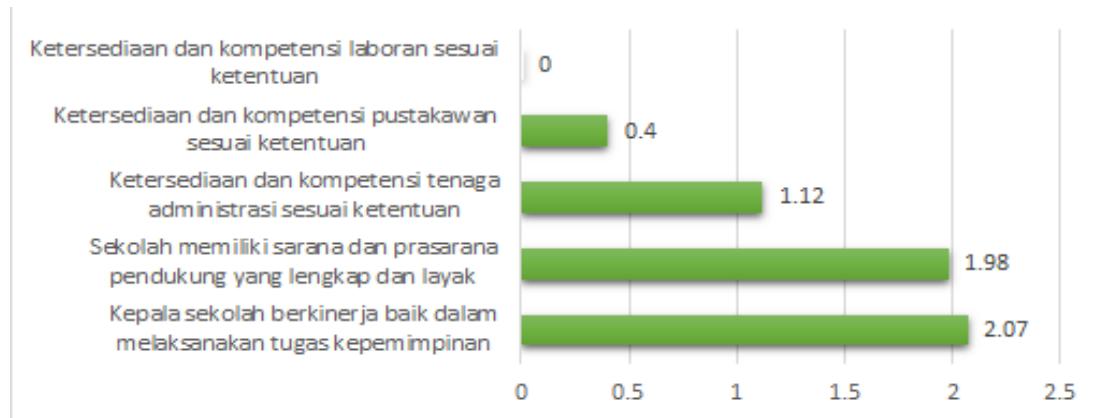
Nilai rerata capaian SNP jenjang SD pada semua kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan berada pada kategori “menuju SNP 4”. Perolehan nilai rerata tertinggi adalah Kota Parepare sebesar 5.68 sedangkan nilai rerata terendah pada Kabupaten Luwu Utara dengan skor 5.4

Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.92
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.35
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.33
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.85
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.9
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.77
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.73
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.67
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.27
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.55
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.85
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.54
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.71
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.7
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.05
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	6.04
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.12
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.4
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.31
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.29
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	1.98
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.42
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.27
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas	2.07

Indikator	Capaian SNP
kepemimpinan	
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.14
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.84
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.8
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.03

Hasil pemetaan mutu 2019 menunjukkan bahwa dari 8 SNP, standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Standar Sarana dan Prasarana merupakan standar dengan skor terendah. Kondisi ini patut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penanggung jawab standar tersebut, utamanya untuk lima indikator dengan capaian terendah.

5 Indikator dengan Capaian Terendah Jenjang SD



Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan mutu pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK serta langkah antisipasinya.

a. Hambatan dan Permasalahan

1. Pelaksanaan pemetaan mutu melalui pengisian kuesioner pada aplikasi PMP belum dipahami sebagai pelaksanaan evaluasi diri sekolah, akibatnya sebagian sekolah melaksanakan program tersebut hanya sekedar menggugurkan kewajiban dari Pemerintah Pusat.
2. Belum adanya kejelasan reward dan punishment bagi satuan pendidikan yang tidak atau terlambat melakukan pengiriman data PMP

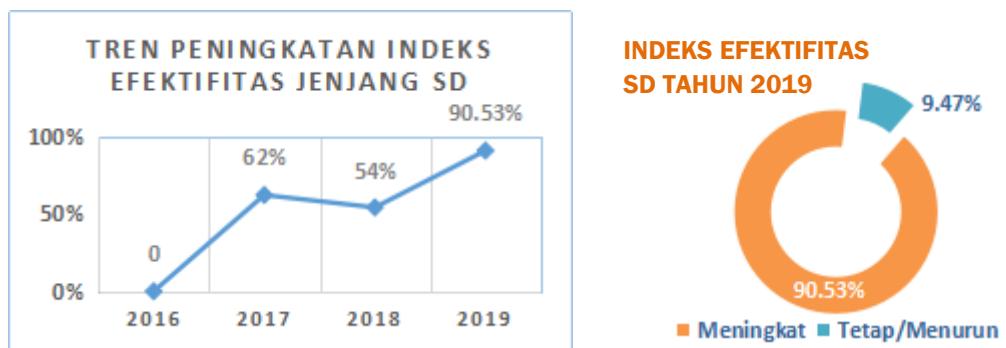
menyebabkan beberapa sekolah kurang termotivasi melakukan pengisian data PMP.

3. Sekolah mengalami kesulitan sinkronisasi data disebabkan kapasitas server pusat tidak memadai untuk menerima pengiriman data yang sangat banyak secara serentak.
 4. Aplikasi PMP terlambat mengeluarkan rapor mutu sekolah sehingga penyusunan rencana pemenuhan mutu juga terlambat dilakukan.
 5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) masih dianggap sebagai kewajiban sekolah-sekolah tertentu saja, seperti sekolah model dan sekolah rujukan.
- b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:
1. Memberikan pemahaman kepada sekolah tentang tujuan dan pentingnya melaksanakan pemetaan mutu melalui peran pengawas sekolah dan penguatan dari LPMP di setiap kesempatan bertemu dengan pihak sekolah.
 2. Mengusulkan perlunya reward dan punishment bagi satuan pendidikan yang tidak atau terlambat melakukan pengiriman data PMP ke penanggung jawab pemetaan Mutu tingkat pusat..
 3. Melakukan koordinasi dengan Satgas PMP di Pusat untuk memaksimalkan pemrosesan dan pengolahan data mutu satuan pendidikan.
 4. LPMP melakukan pendampingan SPMI ke sekolah lain di luar sekolah model dan rujukan.

IKK 2. "SD yang meningkat indeks efektifitasnya"

Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
54%	95%	90.53%	95.29%	100%	95.29%

Ketercapaian indikator ini diukur dengan melihat jumlah satuan pendidikan yang meningkat capaian SNPnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

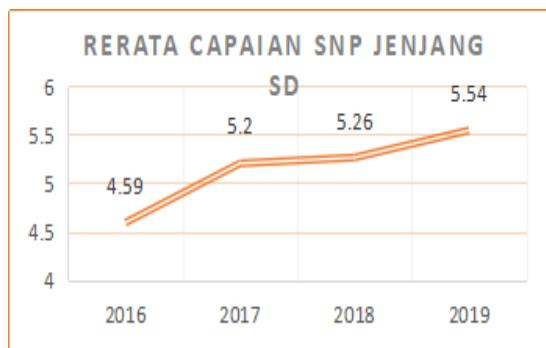


Berdasarkan hasil pengolahan data mutu tahun 2019, realisasi indikator SD yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 90.53% atau 5.783 SD. Capaian tersebut lebih rendah dari target sebesar 95%. Meski demikian, capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Tingginya capaian tersebut antara lain karena adanya perbaikan hasil pengolahan data hasil singkron data aplikasi PMP dan Dapodik yang sebelumnya banyak yang tidak terbaca (error). Selain itu, perbaikan cara penghitungan indeks efektifitas yang sebelumnya berdasarkan “peningkatan kategori capaian SNP” menjadi “peningkatan rerata capaian SNP” turut mempengaruhi tingginya realisasi capaian indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel jumlah SD yang dapat diukur peningkatan indeks efektifitasnya

Tahun	Total SD	SD Mengirim Data PMP	SD Belum Diolah Data Mutunya	SD yang Dihitung Peningkatan Indeksnya	SD yang Menurun/Tetap Indeksnya	SD yang Meningkat Indeks Efektifitasnya	
						JML	%
2017	6,408	6,260	47	6,213	2,345	3,868	62.26%
2018	6,434	6,413	1,500	4,913	2,248	2,665	54.24%
2019	6,434	6,413	25	6,388	605	5,783	90.53%

Hasil pengolahan data mutu pendidikan menunjukkan adanya peningkatan rerata skor SNP jenjang SD setiap tahunnya. Rerata skor SNP jenjang SD tahun 2019 sebesar 5.54 lebih tinggi dibanding dengan rerata skor nasional sebesar 5.51.



Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan antara lain:

1. Pendampingan SPMI pada 435 SD Binaan SPMI/model dimana setiap sekolah selanjutnya melakukan pengimbasan SPMI kepala 5 sekolah lainnya.
2. Fasilitasi SPMI terhadap 25 sekolah rujukan dan 24 sekolah Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian (3P) binaan Direktorat.
3. Melaksanakan bimbingan teknis supervisi mutu pendidikan kepada 719 pengawas sekolah jenjang SD.
4. Optimalisasi peran pengawas sekolah dalam melakukan Supervisi Mutu Pendidikan pada 5.983 SD.
5. Optimalisasi peran pengawas sekolah untuk melakukan verifikasi dan validasi data PMP bagi sekolah binaannya masing-masing.
6. Memaksimalkan peran dan fungsi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
7. LPMP lebih intens memberikan penguatan tentang SPMI pada semua sekolah di wilayah Sulawesi Selatan di setiap kesempatan.
8. Pengembangan aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Daring (e-SPMI) untuk mendukung pelaksanaan SPMI pada semua satuan pendidikan di Sulawesi Selatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan indeks efektifitas jenjang SD,SMP, SMA, dan SMK

adalah:

1. Terbatasnya kewenangan LPMP dalam upaya peningkatan capaian SNP utamanya untuk standar pembiayaan, pendidikan dan tenaga kependidikan, dan sarana prasarana.
2. LPMP tidak mempunyai akses langsung terhadap pengolahan data PMP, akibatnya LPMP



hanya dapat melakukan penghitungan data mutu sesuai rapor mutu satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Satgas PMP Pusat.

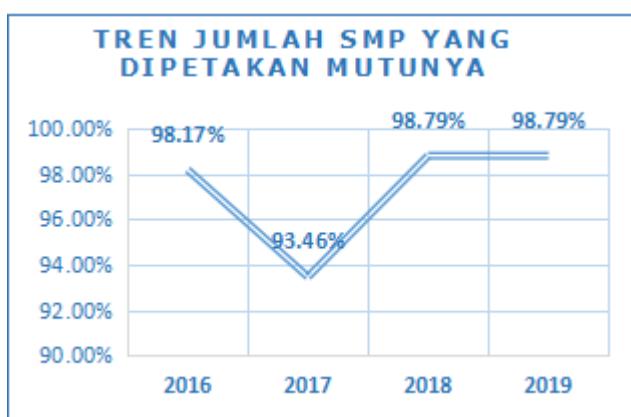
3. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal belum merata di setiap sekolah. SPMI masih dianggap kewajiban bagi sekolah model dan sekolah rujukan saja sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

Langkah antisipasi :

1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan capaian 8 SNP.
2. Melakukan koordinasi dengan satgas PMP Pusat terkait pengolahan data PMP serta memberikan saran untuk pengembangan dan perbaikan aplikasi PMP.
3. Memberikan pemahaman tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal kepada satuan pendidikan di setiap kesempatan.

IKK 3. “SMP yang telah dipetakan mutunya”

Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
98.79%	100%	98.79	98.79%	100%	98.79%



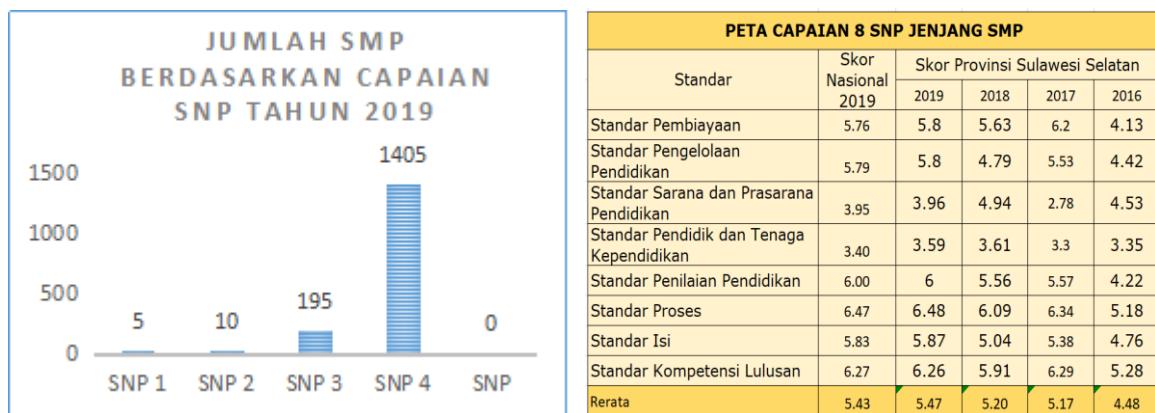
Realisasi indikator SMP yang telah dipetakan mutunya tahun 2019 sama dengan capaian tahun sebelumnya. Dari target 1.648 SMP, yang terealisasi sebesar 1.628 (98.79%). Namun demikian, dari 1.628 SMP yang melakukan pemetaan mutu

melalui Aplikasi PMP, sebanyak 1.615 SMP yang data rapor mutunya dapat diolah. Ini berarti terdapat peningkatan jumlah SMP yang rapor mutunya dapat diolah dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.239 sekolah.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait utamanya dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan satuan pendidikan.
2. Mengoptimalkan peran pengawas sekolah jenjang SMP dalam mengawal pemetaan mutu di sekolah binaan masing-masing. Sebanyak 302 pengawas jenjang SMP yang dilatih untuk mendampingi kegiatan pemetaan mutu pada Tahun 2019. Setiap pengawas memiliki kewajiban melakukan pendampingan pemetaan mutu pada sekolah binaannya masing-masing.
3. Melakukan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ke sekolah, sebagai upaya pemahaman tentang pentingnya pemetaan mutu di sekolah.

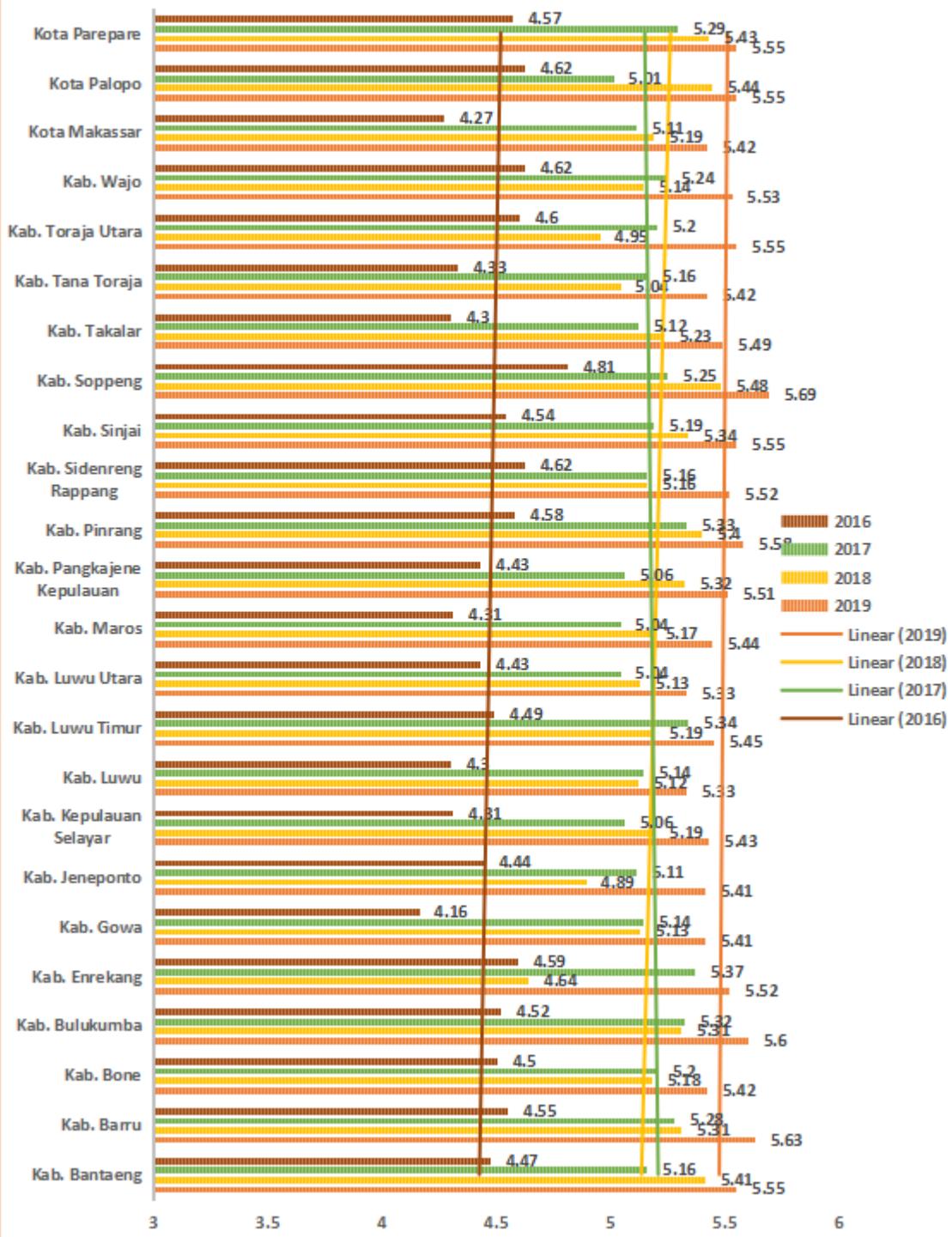
PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP TAHUN 2019



Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.9
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.5
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.5
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.3
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.88
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6.43
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.63
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.65
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.16
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.61

Indikator	Capaian SNP
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.71
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.46
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.5
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.7
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.29
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.74
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.78
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.58
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.73
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.35
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.78
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.06
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.38
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.24
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.05
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.02
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.74
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.68
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.99

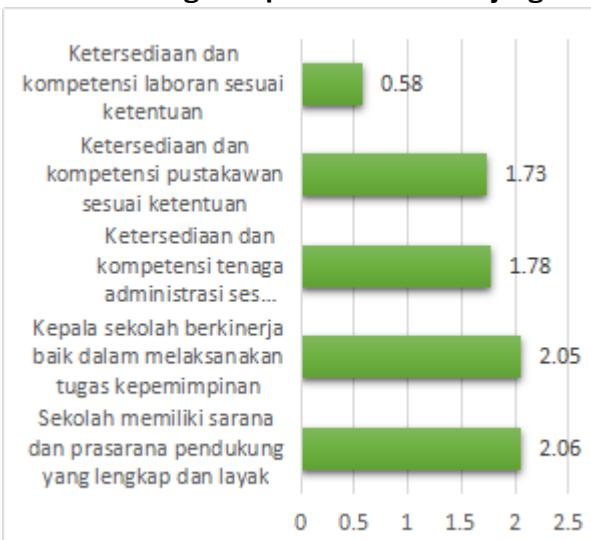
PERBANDINGAN RERATA CAPAIAN SNP PER KAB/KOTA JENJANG SMP



Nilai rerata capaian SNP mengalami peningkatan pada semua kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan berada pada kategori “menuju SNP 4”. Perolehan nilai rerata tertinggi adalah Kabupaten Soppeng dengan capaian 5.69 dan nilai rerata terendah pada Kabupaten Luwu dan Luwu Utara sebesar 5.33.

Hasil pengolahan data mutu 2019 menunjukkan bahwa dari 8 SNP, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Standar Sarana dan Prasarana merupakan standar yang mendapatkan skor rendah. Dari 8 (delapan) SNP, tiga standar (PTK, Sapras, dan Pembiayaan) merupakan kewenangan pemerintah daerah dan LPMP sebagai UPT Kemdikbud yang berkedudukan di daerah tidak dapat melakukan intervensi langsung terhadap ketiga standar tersebut.

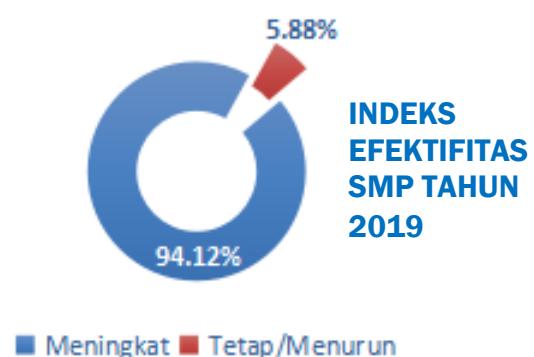
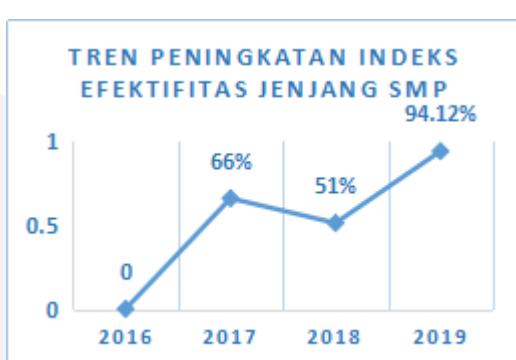
5 Indikator dengan Capaian Terendah Jenjang SMP



IKK 4. “SMP yang meningkat indeks efektifitasnya”

Realisasi 2018	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
51.25%	95%	94.12%	99.07%	95%	99.07%

Peningkatan indeks efektifitas satuan pendidikan diukur dengan melihat jumlah satuan pendidikan yang meningkat capaian SNPnya dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

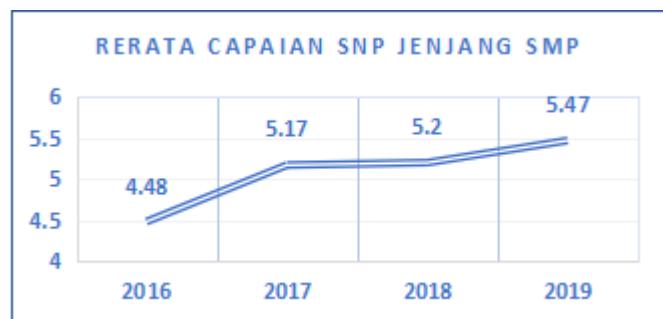


Berdasarkan hasil pengolahan data mutu tahun 2019, realisasi indikator kinerja SMP yang meningkat indeks efektifitasnya belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 95%, realisasinya mencapai 94,12% (1.520 sekolah) dengan persentase capaian sebesar 99,07%. Meski demikian, capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Tingginya capaian tersebut antara lain karena adanya perbaikan pengolahan data hasil singkron data aplikasi PMP dan Dapodik yang sebelumnya banyak yang tidak terbaca (error). Selain itu, perbaikan cara penghitungan indeks efektifitas yang sebelumnya berdasarkan “peningkatan kategori capaian SNP” menjadi “peningkatan rerata capaian SNP” turut mempengaruhi tingginya realisasi capaian indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel jumlah SMP yang dapat diukur peningkatan indeks efektifitasnya

Tahun	Total SMP	SMP Mengirim Data PMP	SMP Belum Diolah Data Mutunya	SMP yang Dihitung Peningkatan Indeksnya	SMP yang Menurun/Tetap Indeksnya	SMP yang Meningkat Indeks Efektifitasnya	
						JML	%
2017	1,636	1,529	28	1,521	497	1,004	66.01%
2018	1,648	1,628	389	1,239	604	635	51.25%
2019	1,648	1,628	13	1,615	95	1,520	94.12%

Hasil pemetaan mutu pendidikan tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan adanya peningkatan rerata skor SNP jenjang SMP setiap tahunnya. Rerata skor SNP jenjang SMP tahun 2019 sebesar 5.47 lebih tinggi dibanding dengan rerata skor nasional sebesar 5.43.



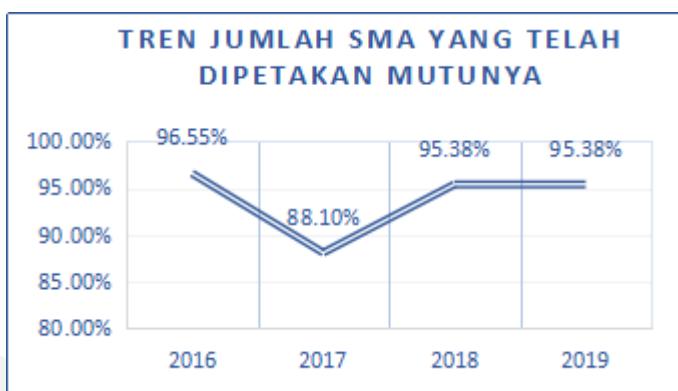
Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan antara lain:

1. Pendampingan SPMI pada 89 SMP Binaan SPMI/sekolah model dimana setiap sekolah selanjutnya melakukan pengimbangan SPMI kepala 5 sekolah lainnya
2. Fasilitasi SPMI terhadap 28 SMP Bermutu Binaan Direktorat.
3. Pendampingan implementasi kurikulum 2013 pada 1648 SMP.

- Melaksanakan bimbingan teknis supervisi mutu pendidikan kepada 302 pengawas jenjang SMP.
- Optimalisasi peran pengawas sekolah dalam melakukan Supervisi Mutu Pendidikan pada 1.555 SMP.
- Optimalisasi peran pengawas sekolah jenjang SMP untuk melakukan verifikasi dan validasi data PMP bagi sekolah binaannya masing-masing.
- Memaksimalkan peran dan fungsi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
- Pengembangan aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Daring (e-SPMI) untuk mendukung pelaksanaan SPMI pada semua satuan pendidikan di Sulawesi Selatan.
- Fasilitasi dan supervisi mutu pendidikan melalui kemitraan dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk bimbingan teknis SPMI, Pelatihan pembinaan kelompok kerja pengawas sekolah, seleksi calon kepala sekolah, fasilitasi penguatan kepala sekolah, dan bimtek persiapan pendidikan profesi guru.

IKK 5. "SMA yang telah dipetakan mutunya"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
88.10	100%	95.38%	95.38%%	100%	95.38%



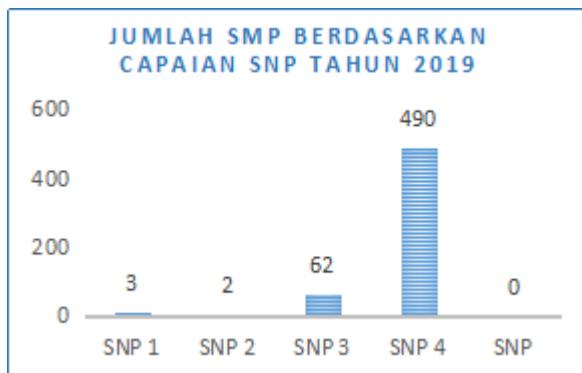
Realisasi indikator SMA yang telah dipetakan mutunya tahun 2019 sama dengan capaian tahun sebelumnya. Dari target 584 SMA, yang terealisasi sebesar 557 (95.38%) dan semua SMA yang melakukan penginputan dan pengiriman data PMP dapat diolah data mutunya. Ini berarti terdapat peningkatan jumlah SMA yang rapor mutunya dapat diolah dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapa 440 sekolah.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut adalah mengoptimalkan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan, melakukan bimbingan teknis pemetaan mutu kepada 131 pengawas sekolah jenjang SMA, mengoptimalkan fungsi operator sekolah dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan FOPPSI Propinsi Sulawesi Selatan, dan pemberian penghargaan/reward bagi 10 kabupaten/kota dengan progress pengiriman data tertinggi.

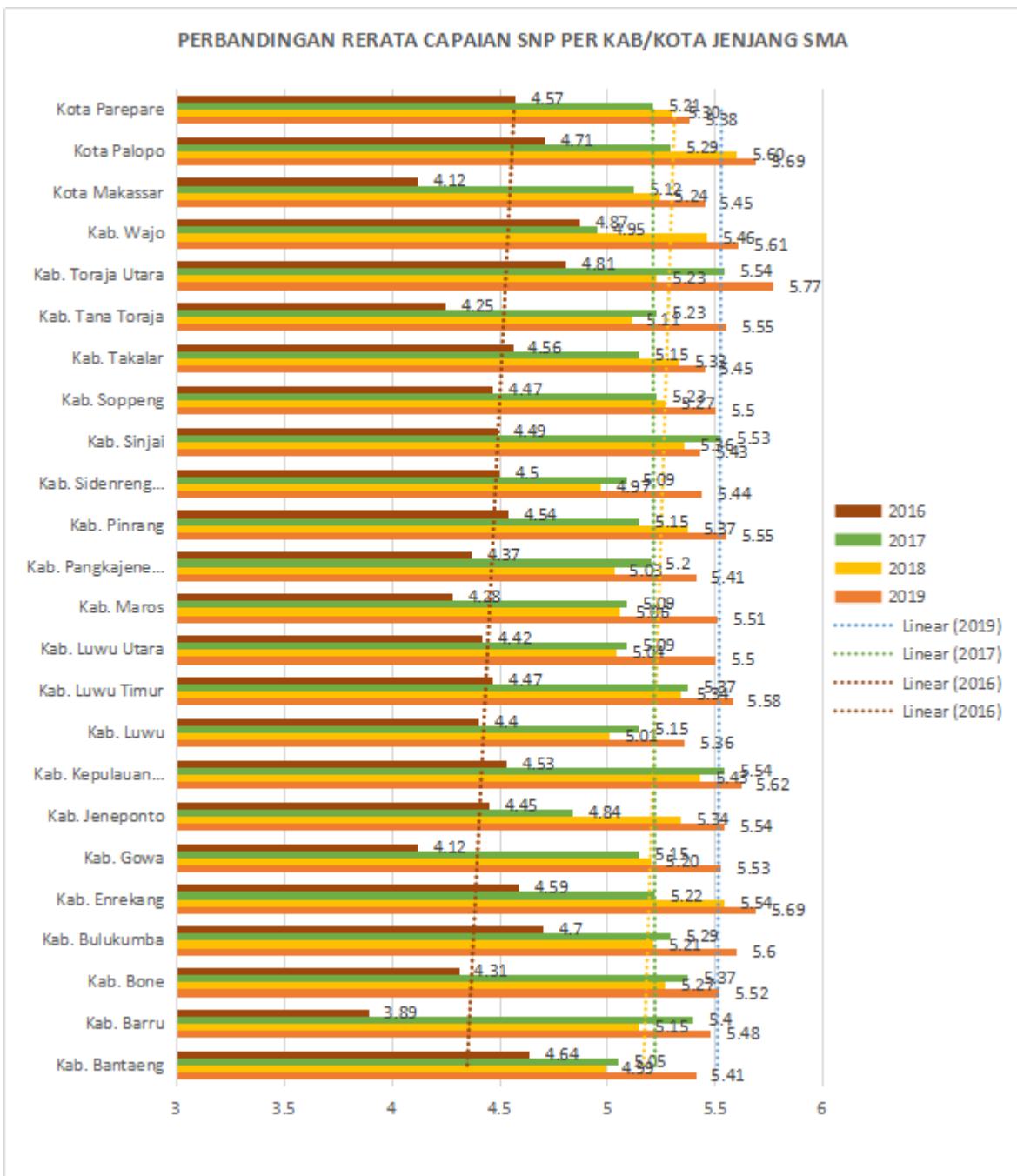
*Penyusunan Rekomendasi
Peningkatan Mutu Pendidikan
berdasarkan hasil pemetaan Mutu
2018 yang dilaksanakan pada
tanggal 02 s.d. 05 Mei 2019*



PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMA TAHUN 2019



Standar	Skor Nasional 2019	PETA CAPAIAN 8 SNP JENJANG SMA			
		2019	2018	2017	2016
Standar Pembiayaan	5.80	5.75	5.66	5.72	3.8
Standar Pengelolaan Pendidikan	5.84	5.82	4.97	5.69	4.41
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.39	4.31	4.23	2.89	4.62
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.54	3.6	3.22	3.3	3.44
Standar Penilaian Pendidikan	6.11	6.07	5.63	5.77	4.1
Standar Proses	6.52	6.52	6.14	6.45	5.12
Standar Isi	5.60	5.62	5.21	5.28	4.61
Standar Kompetensi Lulusan	6.39	6.37	6.07	6.5	5.65
Rerata	5.52	5.51	5.14	5.20	4.47



Nilai rerata capaian SNP jenjang SMA mengalami peningkatan pada semua kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan berada pada kategori “menuju SNP 4”. Perolehan nilai rerata tertinggi adalah Kabupaten Toraja Utara dengan capaian 5.77 dan nilai rerata terendah pada Kabupaten Luwu sebesar 5.36.

Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.89
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.83
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.62
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	4.95
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.95
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.97
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.63
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.71
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.21
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.63
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.68
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.43
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.52
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	6.09
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.38
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.68
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.83
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.61
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.67
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.58
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.74
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	3.68
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.39
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.29
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.08
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.02
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.6
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.64
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.03

Hasil pemetaan mutu tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 8 SNP, standar PTK merupakan standar dengan rerata terendah (3.6). Kondisi ini patut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah sebagai penanggung jawab standar tersebut, utamanya untuk lima indikator dengan capaian terendah. Dari 8 (delapan) SNP, tiga standar (PTK, Sapras, dan Pembiayaan) merupakan kewenangan pemerintah daerah dan LPMP sebagai UPT Kemdikbud tidak dapat melakukan intervensi langsung terhadap ketiga standar tersebut.

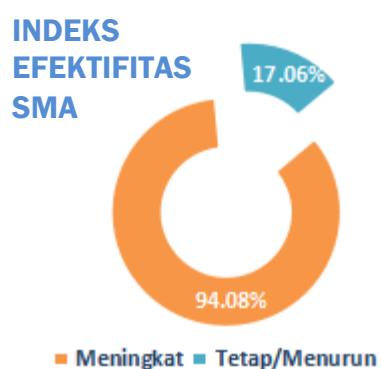
5 Indikator dengan Capaian Terendah Jenjang SMA



IKK 6. "SMA yang meningkat indeks efektifitasnya"

Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%Capaian		
45.23%	95%	94.08%	99.03%	95%	99.03%

Realisasi indikator ini diukur dengan melihat jumlah satuan pendidikan yang meningkat rerata capaian SNP-nya dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

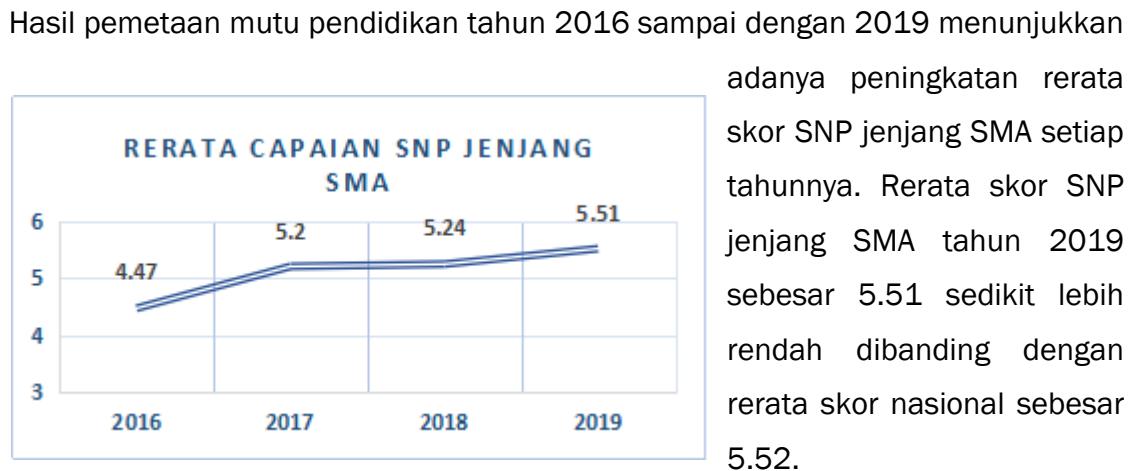


Berdasarkan hasil pengolahan data mutu tahun 2019, realisasi indikator kinerja SMA yang meningkat indeks efektifitasnya belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target 95%, realisasinya mencapai 94,08% (524 sekolah)

dengan persentase capaian sebesar 99,03%. Meski demikian, capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Tingginya capaian tersebut antara lain karena adanya perbaikan pengolahan data hasil singkron data aplikasi PMP dan Dapodik yang sebelumnya banyak yang tidak terbaca (error). Selain itu, perbaikan cara penghitungan indeks efektifitas yang sebelumnya berdasarkan “peningkatan kategori capaian SNP” menjadi “peningkatan rerata capaian SNP” turut mempengaruhi tingginya realisasi capaian indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel jumlah SMA yang dapat diukur peningkatan indeks efektifitasnya

Tahun	Total SMA	SMA Mengirim Data PMP	SMA Belum Diolah Data Mutunya	SMA yang Dihitung Peningkatan Indeksnya	SMA yang Menurun/Tetap Indeksnya	SMA yang Meningkat Indeks Efektifitasnya	
						JML	%
2017	580	572	78	494	142	352	71.26%
2018	584	557	117	440	241	199	45.23%
2019	584	557	-	557	95	524	94.08%



Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan antara lain :

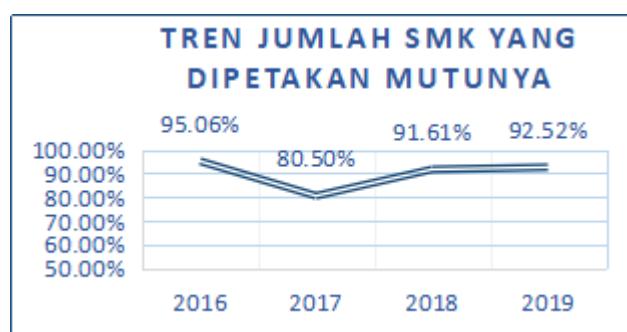
1. Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 pada 575 SMA.
2. Fasilitasi Pengembangan Sekolah SPMI pada 26 SMA.
3. Pelaksanaan Supervisi Mutu Pendidikan pada 575 SMA.
4. Optimalisasi peran pengawas sekolah jenjang SMA dalam melakukan verifikasi dan validasi data PMP bagi sekolah binaannya masing-masing.

- Pengembangan aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Daring (e-SPMI) untuk mendukung pelaksanaan SPMI pada semua satuan pendidikan di Sulawesi Selatan.



IKK 7. "SMK yang telah dipetakan mutunya"

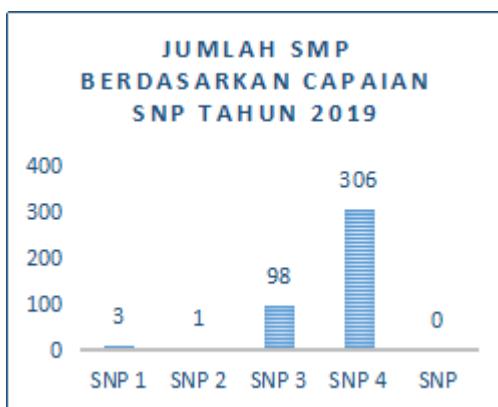
Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
9.61%	100%	92.52%	100%	100%	92.52%



Persentase SMK yang dipetakan mutunya pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari target 441 SMK, yang terealisasi sebesar 92.52% atau 408 sekolah %. Beberapa sekolah tidak melakukan pengumpulan data mutu karena siswanya tinggal sedikit (satu romongan belajar).

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut adalah mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan bimbingan teknis pemetaan mutu terhadap 85 pengawas sekolah jenjang SMK, melakukan bimbingan teknis kepada operator pendataan dinas pendidikan provinsi, dan mengoptimalkan fungsi operator sekolah dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan FOPPSI Propinsi Sulawesi Selatan.

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMK TAHUN 2019

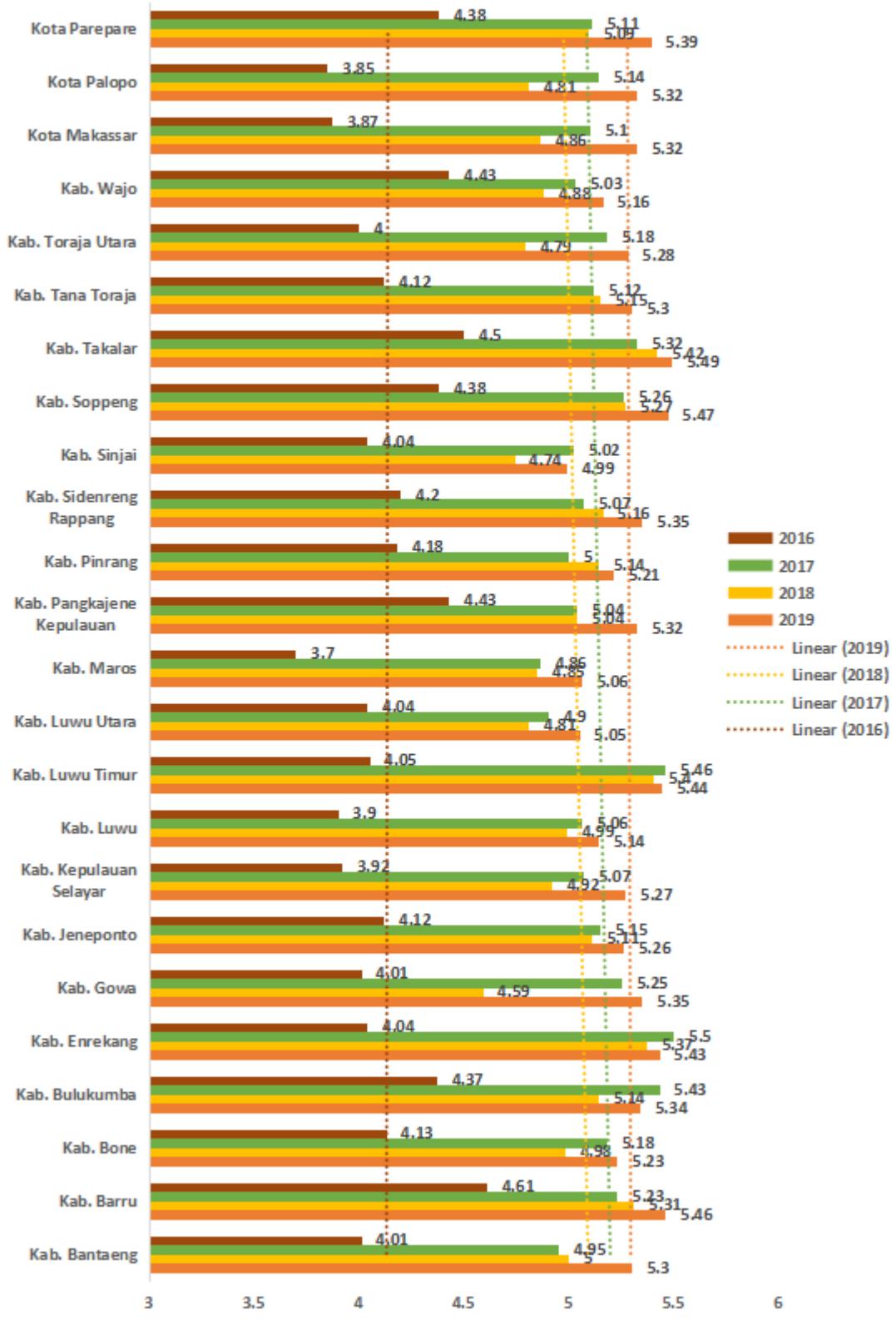


Standar	Skor Nasional 2019	Skor Provinsi Sulawesi Selatan			
		2019	2018	2017	2016
Standar Pembelajaran	5.86	5.81	5.58	5.75	3.66
Standar Pengelolaan Pendidikan	5.81	5.77	4.82	5.49	4.01
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.97	2.95	3.77	2.91	3.81
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.17	3.29	3.41	3.02	2.99
Standar Penilaian Pendidikan	6.03	5.95	5.54	5.81	3.99
Standar Proses	6.47	6.47	6.15	6.4	5
Standar Isi	5.68	5.68	4.94	5.25	4.73
Standar Kompetensi Lulusan	6.35	6.32	6.02	6.4	4.94
Rerata	5.29	5.28	5.03	5.13	4.14

Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.9
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.58
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.61
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.12
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.92
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.6
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.7
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.13
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.47
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.56
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.27
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.36
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	6.09
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.04
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.23
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.78
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.59

Indikator	Capaian SNP
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.36
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	2.97
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.31
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	3.37
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.24
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.28
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.09
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	5.99
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.77
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.65
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4

PERBANDINGAN RERATA CAPAIAN SNP PER KAB/KOTA JENJANG SMK



Nilai rerata capaian SNP jenjang SMK mengalami peningkatan pada semua kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Sebanyak 22 kabupaten/kota berada pada kategori “menuju SNP 4” dan 2 lainnya (kabupaten Luwu Utara dan Sinjai) berada pada kategori “menuju SNP 3”. Perolehan nilai rerata tertinggi adalah Kabupaten Takalar dengan capaian 5.49 dan nilai rerata terendah pada Kabupaten Sinjai sebesar 4.99.

Sebagai catatan, bahwa dari 8 (delapan) SNP, tiga standar (PTK, Sapras, dan Pembiayaan) merupakan kewenangan pemerintah daerah dan LPMP sebagai UPT Kemdikbud tidak dapat melakukan intervensi langsung terhadap ketiga standar tersebut.

5 Indikator dengan Capaian Terendah Jenjang SMK

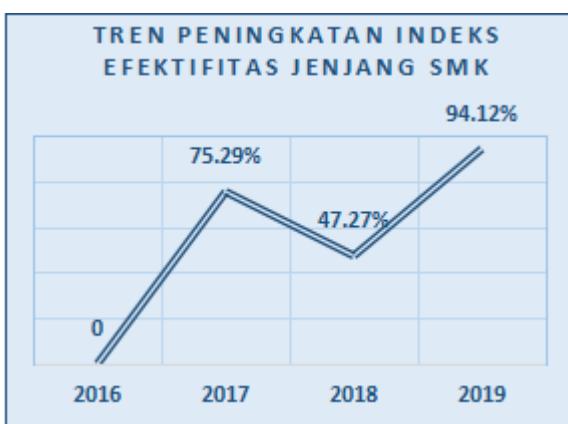


Tim Pengolah dan Penyusun Data Mutu Pendidikan sedang berdiskusi. Kegiatan Penyusunan dan Pengolahan Data Mutu Pendidikan melibatkan unsur pengawas sekolah dan LPMP

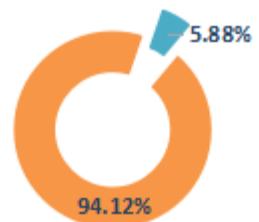
IKK 8. "SMK yang meningkat indeks efektifitasnya"

Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%Capaian		
47%	95%	94.12%	99.07%	95%	99.07%

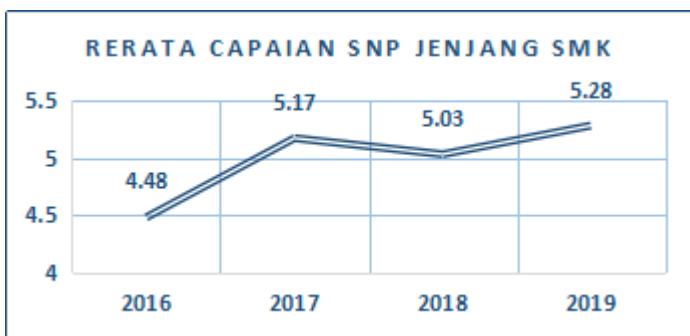
Capaian indikator ini diukur dengan melihat jumlah satuan pendidikan yang meningkat rerata capaian SNPnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya.



INDEKS EFEKTIFITAS SMK TAHUN 2019



Realisasi indikator kinerja SMK yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 94.12% atau 384 SMK. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 47.27%. Tingginya capaian tersebut antara lain karena adanya perbaikan pengolahan data hasil singkron data aplikasi PMP dan Dapodik yang sebelumnya banyak yang tidak terbaca (error). Selain itu, perbaikan cara penghitungan indeks efektifitas yang sebelumnya berdasarkan “peningkatan kategori capaian SNP” menjadi “peningkatan rerata capaian SNP” turut mempengaruhi tingginya realisasi capaian indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya



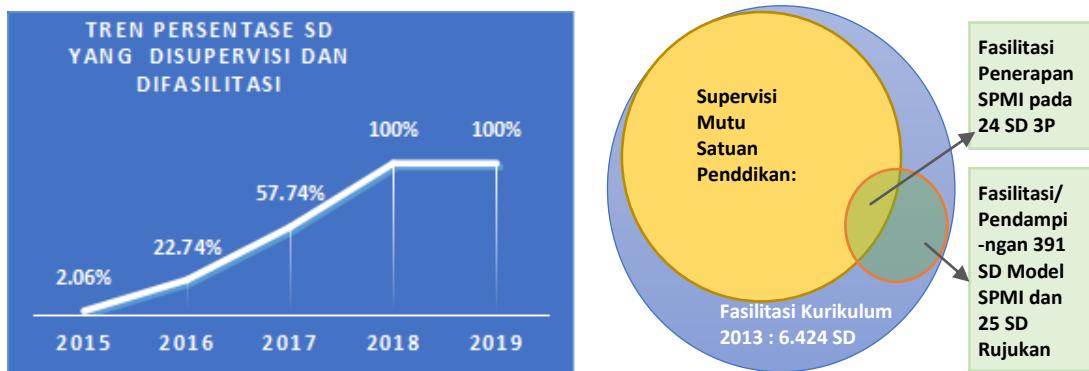
Pada tahun 2019, rerata skor SNP jenjang SMK sebesar 5.28, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dibanding rerata skor SNP

nasional sebesar 5.29.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks efektifitas SMK antara lain : supervisi dan fasilitasi pengembangan sekolah SPMI/sekolah Model pada 24 SMK, pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 pada 432 SMK, dan Supervisi Mutu Pendidikan pada 429 SMK.

IKK 9. "Percentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi 2018	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
100%	80%	100%	125%	80%	125%

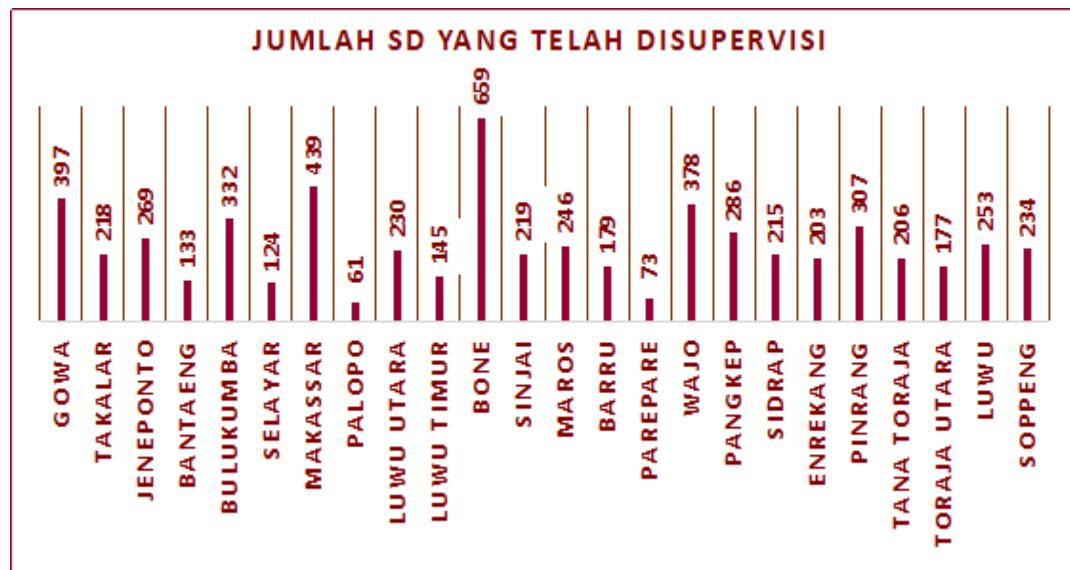


Realisasi kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP hingga tahun 2019 mencapai 100% (6.424 SD). Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam PK sebesar 80%. Ketercapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Supervisi Satuan Pendidikan dalam pencapaian SNP, Fasilitasi Sekolah SPMI Binaan LPMP, dan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 telah tuntas dilaksanakan pada tahun 2018. Khusus capaian tahun 2019, dari total 6434 SD, sebanyak 5.983 SD yang disupervisi dalam pencapaian SNP dan 440 SD yang difasilitasi melalui program sekolah binaan SPMI/Model, rujukan, dan 3P Binaan Direktorat.

a. Supervisi Satuan Pendidikan dalam Pencapaian SNP

Program Supervisi Satuan Pendidikan dalam Pencapaian SNP bertujuan untuk menghasilkan satuan pendidikan yang terbina dalam mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan khususnya Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kegiatan supervisi mutu pendidikan mencakup supervisi dalam integrasi penerapan Kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, dan aspek mutu lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Pada tahun 2019 jumlah satuan pendidikan jenjang SD yang disupervisi dalam pencapaian SNP sebanyak 5.983 sekolah. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sejumlah 5.164 sekolah. Tingginya realisasi dikarenakan adanya optimalisasi anggaran pada kegiatan tersebut. Semua



Mutu Pendidikan terhadap 719 pengawas sekolah jenjang SD, Supervisi Mutu terhadap 5.983 Satuan Pendidikan jenjang SD, Analisis Hasil Supervisi Mutu Pendidikan, dan Diseminasi dan Rekomendasi Hasil Supervisi Mutu Pendidikan. Semua kegiatan tersebut melibatkan unsur dinas pendidikan, pengawas sekolah, satuan pendidikan dan stakeholder pendidikan lainnya.

Hasil analisis supervisi mutu pendidikan selanjutnya dimanfaatkan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja sekolah oleh satuan pendidikan sehingga upaya pemenuhan SNP terlaksana sebagaimana mestinya (sesuai dengan kebutuhan).



b. Fasilitasi Satuan Pendidikan dalam Penerapan SPMI

Program fasilitasi penerapan SPMI bertujuan untuk membentuk budaya mutu satuan pendidikan melalui penerapan siklus SPMI, mulai dari pemetaan mutu, perencanaan mutu, pelakasanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar-strategi baru.

Pada tahun 2019 jumlah sekolah binaan SPMI jenjang SD yang dikembangkan mutu pendidikannya sebanyak 440 sekolah. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 389 sekolah. Tingginya realisasi capaian tersebut dikarenakan adanya pengalihan kuota sekolah model/SPMI dari jenjang SMA/SMK ke jenjang SMP sebanyak 2 sekolah dan fasilitasi SPMI terhadap 25 sekolah rujukan serta 24 sekolah Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian (3P) binaan Direktorat.



Sebagai catatan, dari 440 SD sasaran SPMI tahun 2019, terdapat 44 SD yang baru mengikuti fasilitasi sekolah SPMI/Model binaan LPMP pada tahun 2019 untuk menggantikan sekolah sebelumnya yang sudah mampu menerapkan SPMI

secara mandiri. Selain itu, sebanyak 25 SD rujukan dan 24 SD 3P juga difasilitasi dalam penerapan SPMI tahun ini. Dengan demikian, sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, sebanyak 484 SD yang telah difasilitasi dalam penerapan SPMI dimana setiap sekolah model/SPMI harus melakukan pengimbasan penerapan SPMI kepada minimal 5 sekolah lain yang ada disekitar sekolah tersebut.

Program sekolah binaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI)/sekolah model yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah menghasilkan perubahan mendasar pada satuan pendidikan jenjang SD yang telah didampingi oleh LPMP dan FASDA antara

lain: Sekolah telah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai siklus, proses pengisian data PMP yang lebih valid dan akurat sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana pemenuhan mutu dan atau rencana kerja sekolah. Selain itu, secara sadar sekolah telah melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik minimal sekali dalam setahun. Program pendampingan ini juga telah menghasilkan berbagai inovasi sekolah contohnya: program gerakan literasi sekolah sudah terlaksana dengan berbagai bentuk kegiatan, penataan lingkungan sekolah yang sehat dan asri, penguatan pendidikan karakter melalui program pembiasaan, dan dokumentasi/administrasi sekolah sudah tertata dengan baik. Peningkatan SDM sekolah telah menghasilkan perubahan pada guru dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, penilaian hasil belajar.

c. Program Inovasi LPMP Sulawesi Selatan dalam Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Mutu Pendidikan

LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mengembangkan aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Daring (e-SPMI). Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan SPMI pada semua satuan pendidikan di Sulawesi Selatan. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan semua satuan pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan dapat menerapkan SPMI secara mandiri.

Aplikasi berbasis web ini berisi semua informasi yang dibutuhkan satuan pendidikan dalam rangka penerapan SPMI secara mandiri. Selain itu, aplikasi ini juga akan memberi kemudahan pada LPMP Sulawesi Selatan dalam melakukan pendampingan pelaksanaan SPMI dengan tersedianya data progress pelaksanaan SPMI pada setiap satuan pendidikan yang telah memanfaatkan aplikasi ini. Pada tahun 2019, sasaran program ini adalah 480 sekolah SPMI Binaan LPMP Sulawesi Selatan dan 25 sekolah rujukan Binaan Direktorat. Diharapkan ke depannya seluruh satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat memanfaatkan aplikasi e-SPMI dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara internal.



d. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Mutu Pendidikan Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK serta Langkah Antisipasinya.

Hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan kegiatan adalah:

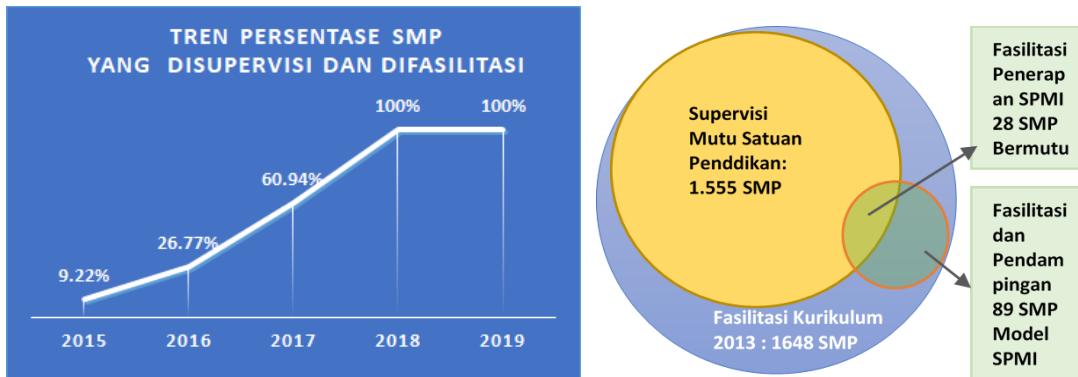
1. Aplikasi e-supervisi yang digunakan pengawas sekolah dalam melakukan pelaporan hasil supervisi belum final (masih dalam tahap pengembangan).
2. Petunjuk teknis pelaksanaan program supervisi mutu pendidikan terlambat disampaikan ke satker sehingga pelaksanaan program juga mengalami keterlambatan.
3. Terbatasnya waktu pelaksanaan setiap tahapan program supervisi dan fasilitasi mutu pendidikan.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Pelaporan supervisi mutu pendidikan oleh pengawas sekolah untuk sementara dilakukan dalam bentuk *offline*.
2. Melakukan koordinasi dengan eselon I untuk melakukan percepatan penyusunan petunjuk teknis supervisi mutu pendidikan.
3. Memaksimalkan waktu yang ada dan mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

IKK 10. "Percentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
100%	80%	100%	125%	80%	125%



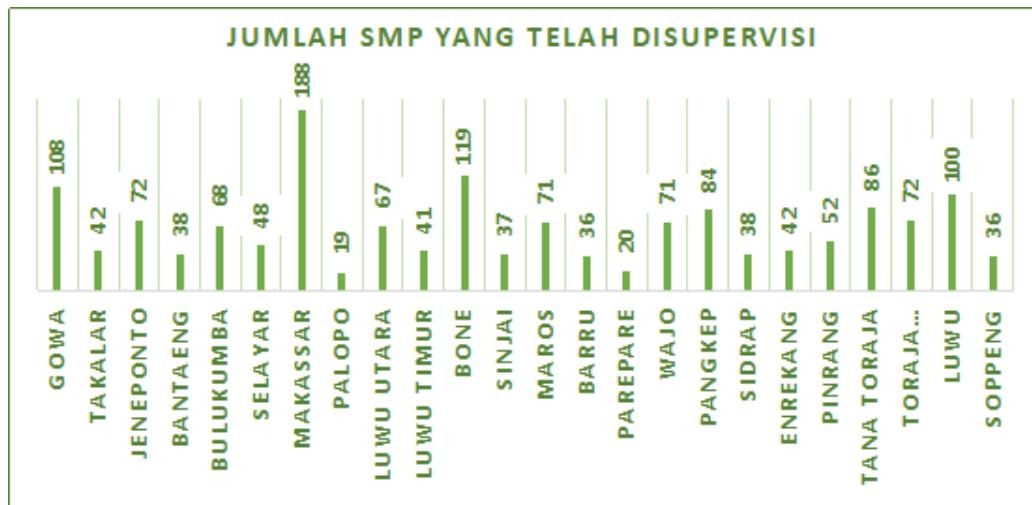
Realisasi kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP hingga tahun 2019 mencapai 100% (1648 SMP). Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam PK sebesar 80%. Ketercapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Fasilitasi Sekolah SPMI Binaan LPMP, Supervisi Satuan Pendidikan dalam pencapaian SNP, dan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 telah tuntas dilaksanakan pada tahun 2018. Khusus capaian tahun 2019, dari total 1648 SMP, sebanyak 1.555 SMP yang disupervisi dalam pencapaian SNP, 84 SMP yang difasilitasi melalui program sekolah SPMI/Model binaan LPMP dan 24 SMP Bermutu binaan Direktorat yang difasilitasi dalam penerapan SPMI.

a. Supervisi Satuan Pendidikan dalam Pencapaian SNP

Kegiatan supervisi mutu pendidikan mencakup supervisi dalam integrasi penerapan Kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, dan aspek mutu lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan. Hasil supervisi mutu pendidikan tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja sekolah oleh satuan pendidikan.

Pada tahun 2019 jumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang disupervisi dalam pencapaian SNP sebanyak 1.555 sekolah. Jumlah tersebut lebih tinggi

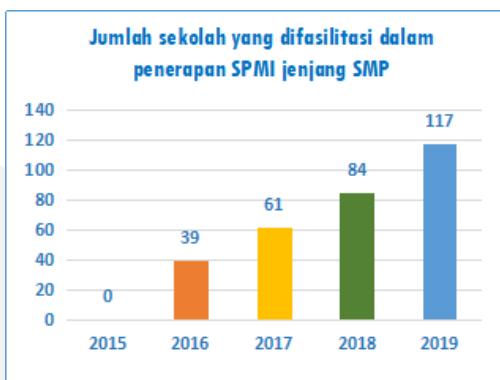
dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sejumlah 1.318 sekolah. Tingginya realisasi dikarenakan adanya optimalisasi anggaran pada kegiatan tersebut.



Dok. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Supervisi Mutu Satuan Pendidikan

b. Fasilitasi Satuan Pendidikan dalam Penerapan SPMI

Pendampingan sekolah model bertujuan untuk membentuk budaya mutu satuan pendidikan melalui penerapan siklus SPMI.



Jumlah sekolah SPMI jenjang SMP yang dikembangkan mutunya pada tahun 2019 sebanyak 117 sekolah. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sejumlah 84 sekolah. Tingginya realisasi tersebut

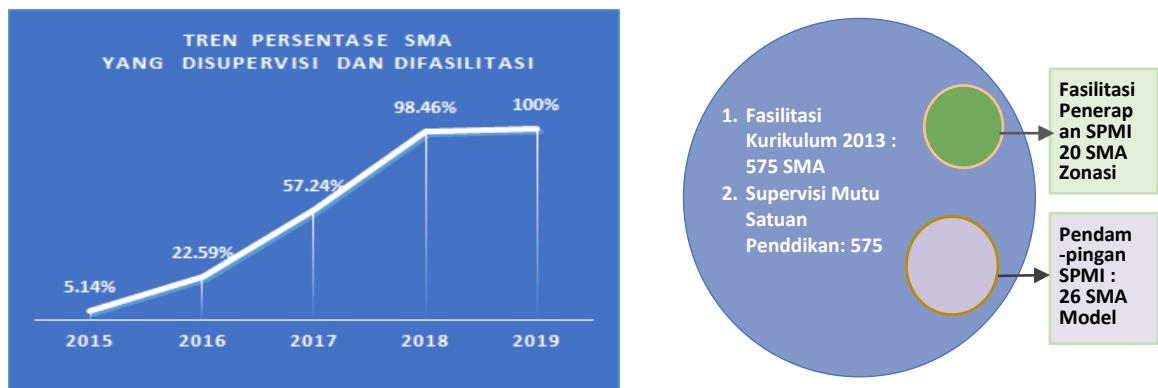
dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari eselon I yang mengharuskan LPMP melakukan fasilitasi SPMI terhadap 28 SMP Bermutu Binaan Direktorat. Selain itu, terdapat pengalihan kuota sekolah SPMI Binaan LPMP (sekolah model) dari jenjang SMA dan SMK sebanyak 5 sekolah ke jenjang SMP sebagai respon atas kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak mengizinkan satuan pendidikan jenjang SMA/SMK untuk terlibat dalam program sekolah model.

Pada tahun 2019, terdapat 35 sekolah yang baru ditetapkan sebagai sasaran kegiatan fasilitasi SPMI Binaan LPMP Sulawesi Selatan untuk mengantikan sekolah sebelumnya yang telah mampu melaksanakan SPMI secara mandiri dan 11 sekolah baru pada tahun 2018. Dengan demikian, sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, sebanyak 158 SMP yang telah difasilitasi dalam penerapan SPMI.

Program sekolah binaan SPMI/sekolah model yang dilaksanakan sejak tahun 2016 telah menghasilkan perubahan mendasar pada satuan pendidikan jenjang SMP yang telah didampingi oleh LPMP Sulawesi Selatan antara lain: sekolah telah melaksanakan SPMI sesuai siklus, proses pengisian data PMP yang lebih valid dan akurat, sekolah secara sadar sekolah telah melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik. Program pendampingan ini juga telah menghasilkan berbagai inovasi sekolah contohnya: program gerakan literasi sekolah sudah terlaksana dengan berbagai bentuk kegiatan, penataan lingkungan sekolah yang sehat dan asri, penguatan pendidikan karakter melalui program pembiasaan, dan dokumentasi/administrasi sekolah sudah tertata dengan baik. Peningkatan SDM sekolah telah menghasilkan perubahan pada guru dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, penilaian hasil belajar.

IKK 11. “Percentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP”

Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
98.46%	80%	100%	100%	80%	100%



Realisasi kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP hingga tahun 2019 mencapai 100% (575 SMA). Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Ketercapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Fasilitasi Satuan Pendidikan dalam Penerapan SPMI, Supervisi Satuan Pendidikan dalam pencapaian SNP, dan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 telah tuntas dilaksanakan pada tahun 2018.

Program fasilitasi dan supervisi mutu pendidikan yang dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah menghasilkan beberapa perubahan mendasar pada satuan pendidikan antara lain: sekolah telah melaksanakan SPMI sesuai siklus, proses pengisian data PMP yang lebih valid dan akurat sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana pemenuhan mutu dan atau rencana kerja sekolah, sekolah telah melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik minimal sekali dalam setahun.

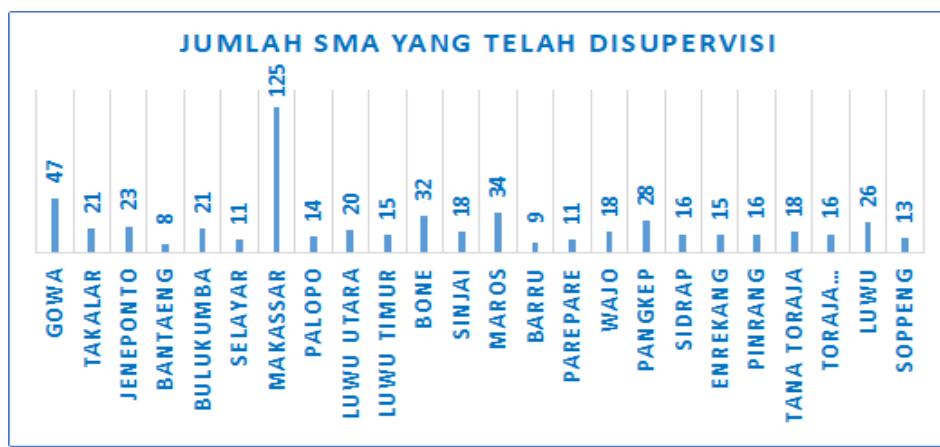
Khusus capaian tahun 2019, sebanyak 575 SMA telah disupervisi dalam pencapaian SNP dan 20 SMA mengikuti program Fasilitasi Penerapan SPMI. Sementara program Pendampingan sekolah SPMI Binaan LPMP untuk jenjang SMA pada tahun ini tidak dilanjutkan sesuai kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Supervisi Satuan Pendidikan dalam Pencapaian SNP

Kegiatan supervisi mutu pendidikan mencakup supervisi dalam integrasi penerapan Kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, dan aspek mutu lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan. Hasil supervisi

mutu pendidikan tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja sekolah oleh satuan pendidikan sehingga upaya pemenuhan 8 SNP berjalan sebagaimana mestinya.

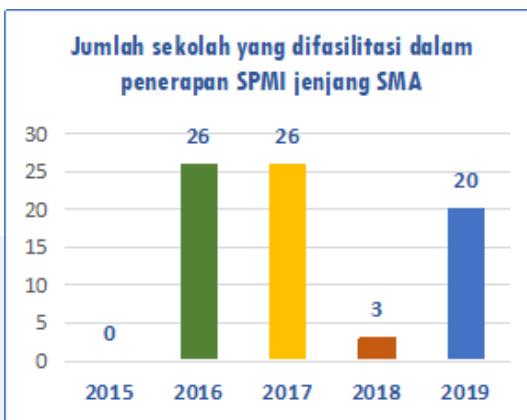
Pada tahun 2019 jumlah satuan pendidikan jenjang SMA yang disupervisi dalam pencapaian SNP sebanyak 575 sekolah. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu 467 sekolah. Tingginya realisasi dikarenakan adanya optimalisasi anggaran pada kegiatan tersebut.



b. Fasilitasi Satuan Pendidikan dalam Penerapan SPMI

Program fasilitasi penerapan SPMI bertujuan untuk membentuk budaya mutu satuan pendidikan melalui penerapan siklus SPMI, mulai dari pemetaan mutu, perencanaan mutu, pelakasanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan strategi baru.

Pada tahun 2019, sebanyak 20 SMA yang difasilitasi dalam penerapan SPMI. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 3 sekolah. Tingginya realisasi tersebut dikarenakan



adanya kebijakan dari eselon I yang mengharuskan LPMP melakukan fasilitasi SPMI terhadap 20 SMA Zonasi Binaan Direktorat. Sementara fasilitasi dan pendampingan SPMI melalui program Sekolah Binaan LPMP/sekolah model untuk tahun

2019 ditiadakan sesuai dengan kebijakan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai catatan, 20 SMA Zonasi tersebut baru mengikuti fasilitasi sekolah SPMI pada tahun 2019. Dengan demikian, sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, sebanyak 46 SMA yang telah difasilitasi dalam penerapan SPMI dimana setiap sekolah harus melakukan pengimbasan penerapan SPMI kepada minimal 5 sekolah lain yang ada disekitar sekolah tersebut.

c. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fasilitasi dan supervisi mutu pendidikan jenjang SMA dan SMK serta langkah antisipasinya.

Hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan kegiatan adalah:

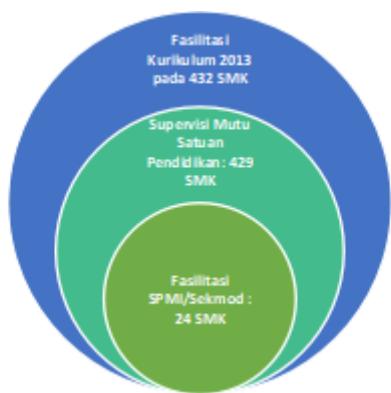
1. Pembagian sekolah binaan untuk pengawas pendidikan menengah (SMA dan SMK) sebagian lintas kabupaten/kota, akibatnya beberapa pengawas terlambat dalam melakukan supervisi mutu pendidikan pada sekolah binaannya.
2. Letak kantor cabang dinas provinsi yang tidak berdasarkan kabupaten/kota menyulitkan komunikasi dan koordinasi pelaksanaan program yang melibatkan pendidikan menengah.
3. Dinamika kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak mengizinkan satuan pendidikan jenjang SMA/SMK untuk melanjutkan mengikuti program pendampingan sekolah SPMI/sekolah model Binaan LPMP Sulawesi Selatan.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Mendorong dan memotivasi pengawas untuk melakukan supervisi mutu pendidikan sesuai jadwal yang telah disepakati.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan dinas pendidikan propinsi dan cabang dinas propinsi dengan melakukan komunikasi dan koordinasi jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Segera melakukan pengalihan komposisi kuota sekolah model dari jenjang SMA/SMK ke jenjang SD dan SMP.

IKK 12. "Percentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
95.92%	80%	100%	125%	80%	120%



Realisasi kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP hingga tahun 2019 mencapai 98% (432 SMK). Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Ketercapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu Fasilitasi Sekolah SPMI Binaan LPMP, Supervisi Satuan Pendidikan dalam pencapaian SNP, dan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013. Kegiatan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 telah tuntas dilaksanakan pada tahun 2018.

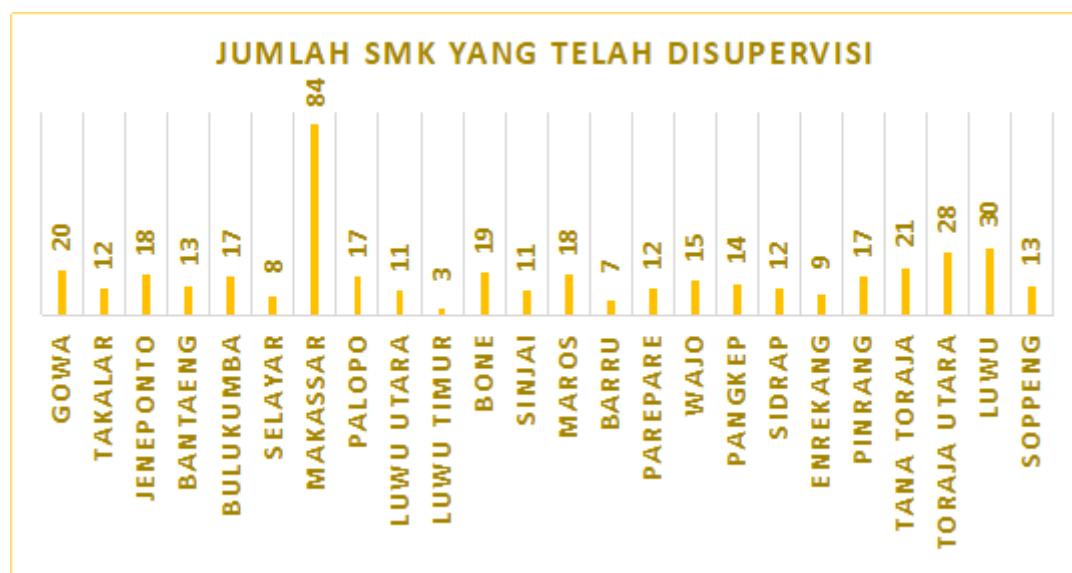
Khusus capaian tahun 2019, dari total 441 SMK, sebanyak 429 SMK yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP sementara program sekolah SPMI Binaan LPMP Suawesi Selatan (sekolah Model) untuk jenjang SMK pada tahun ini tidak dilanjutkan sesuai kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Supervisi Satuan Pendidikan dalam Pencapaian SNP

Program Supervisi Satuan Pendidikan dalam Pencapaian SNP bertujuan untuk menghasilkan satuan pendidikan yang terbina dalam mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan khususnya Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kegiatan supervisi mutu pendidikan mencakup supervisi dalam integrasi penerapan Kurikulum 2013, penguatan

pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, dan aspek mutu lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Pada tahun 2019 jumlah satuan pendidikan jenjang SMK yang disupervisi dalam pencapaian SNP sebanyak 429 sekolah. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sejumlah 353 sekolah. Tingginya realisasi dikarenakan adanya optimalisasi anggaran pada kegiatan tersebut.



b. Fasilitasi Satuan Pendidikan dalam Penerapan SPMI

Program fasilitasi penerapan SPMI bertujuan untuk membentuk budaya mutu satuan pendidikan melalui penerapan siklus SPMI, mulai dari pemetaan mutu, perencanaan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan strategi baru.



Pada tahun 2019, tidak satupun SMK yang terlibat dalam program fasilitasi penerapan SPMI. Ini berarti target 4 SMK yang menjadi sasaran kegiatan SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP melalui kegiatan pendampingan SPMI yang ditetapkan dalam PK tidak tercapai. Hal ini terjadi sebagai imbas dari kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak mengizinkan semua satuan pendidikan jenjang SMA/SMK untuk tidak mengikuti/melanjutkan program pengembangan sekolah Binaan SPMI/Sekolah Model.

Penyajian Materi pada pelaksanaan Bimtek SPMI Tingkat Kab/Kota oleh Fasda SPMI



IKK 13. "Nilai SAKIP LPMP Sulawesi Selatan 80"

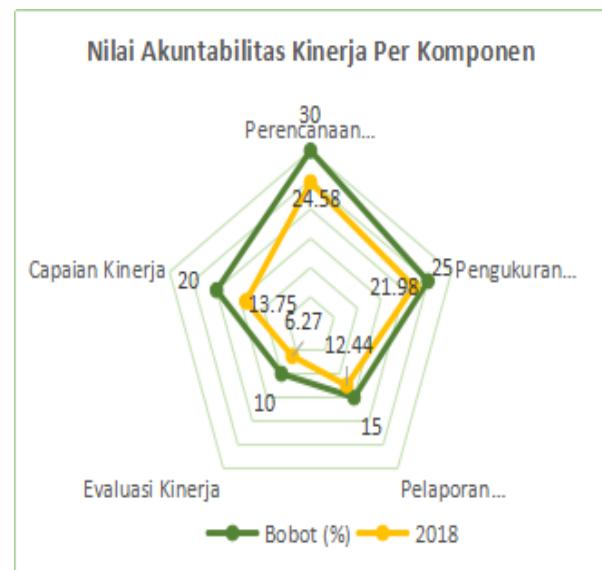
Target	80	Renstra 2019	
Realisasi	79.02	Target	Capaian
Capaian	98,78 %	80	98.78 %

Nilai akuntabilitas kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2019 berada pada kategori "BB" dengan total skor 79.02. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan lebih tinggi dari skor SAKIP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 75.00.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja LPMP Sulawesi Selatan, antara lain:

1. Mengoptimalkan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Menetapkan kontrak kerja dari level eselon hingga individu.
3. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis akuntabilitas kinerja kepada tim SAKIP.
4. Menyusun SOP Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran serta Pelaporan.
5. Melaksanakan Workshop Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
6. Peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai kegiatan seperti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima, Workshop Penatausahaan Barang Milik Negara, Bimtek Penyusunan Instrumen bagi Jabatan Analis dan Penyusun, dan Workshop Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM.



Selain capaian-capaian tersebut diatas, pada tahun 2019, LPMP Sulawesi Selatan melaksanakan beberapa kegiatan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti bimbingan pelatihan pembinaan kelompok kerja pengawas sekolah, seleksi calon kepala sekolah, fasilitasi penguatan kepala sekolah, dan bimbingan teknis persiapan pendidikan profesi guru.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran LPMP Sulawesi Selatan dalam DIPA tahun 2019 sebesar Rp. 106.654.900.000 yang terdistribusi dalam enam output/kegiatan. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 103.694.126.953 dengan persentase daya serap sebesar 97,22%. Grafik berikut ini menyajikan persentase realisasi anggaran LPMP Sulawesi Selatan tahun 2019 pada masing-masing output.



Realisasi anggaran LPMP Sulawesi Selatan tahun 2019 sebesar 97,22% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 79.84%. Meski demikian, realisasi anggaran tahun 2019 lebih rendah dari target dalam perjanjian kinerja sebesar 100%. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai target dalam PK disebabkan adanya sisa anggaran dari belanja barang, sisa kontrak belanja modal, dan sisa belanja pengawai yang tidak bisa dialihkan atau direvisi ke kegiatan lain.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiaya pencapaian kegiatan peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang terdistribusi dalam dua sasaran kegiatan dengan 13 indikator kinerja kegiatannya. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

Sasaran/Indikator		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi Akhir	Realisasi	% Penyerapan
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					39,710,972,000	45,431,712,000	43,246,703,000	95.19%
1 SD yang telah dipetakan mutunya	100%	100%	100%					
2 SD yang meningkat indeks efektivitasnya	95%	91%	95%					
3 SMP yang telah	100%	99%	99%					
					10,651,088,000	9,954,528,000	9,460,588,300	95.04%

Sasaran/Indikator		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi Akhir	Realisasi	% Penyerapan
	dipetakan mutunya							
4	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	95%	94%	99%				
5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	95%	95%				
6	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	95%	94%	99%				
7	SMK yang telah dipetakan mutunya	100%	93%	93%				
8	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	95%	94%	99%				
(001).	Satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	9.128 Sekolah	9008 Sekolah		2,046,444,000	1,771,044,000	1,515,512,500	85.57%
(004).	Satuan pendidikan yang telah terverifikasi mutu pendidikannya	9.128 Sekolah	9008 Sekolah		8,604,644,000	8,183,484,000	7,945,075,800	97.09%
9	Percentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	100%	125%				
10	Percentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	100%	125%				
11	Percentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	100%	125%				
12	Percentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	98%	122%				
(002).	Satuan pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	7.303 Sekolah	8.542 Sekolah		7,846,859,000	15,141,727,000	14,004,833,800	92.49%
(003).	Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	480 Sekolah	577 Sekolah		21,213,025,000	20,335,457,000	19,781,280,900	97.27%
Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sulawesi Selatan yang Baik					36,320,340,000	36,877,146,000	36,317,858,150	98.48%
13	Nilai Minimal SAKIP LPMP Sulawesi Selatan	80	79,02	98.78%				
(0970).	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100%	3,518,276,000	3,518,276,000	3,344,578,600	95.06%
(0951).	Layanan Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%	32,802,064,000	33,358,870,000	32,973,279,550	98.84%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan”, dengan total anggaran sebesar Rp. 45,431,712,000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung ketercapaian 12 indikator kinerja kegiatan dengan rincian:

- a. Indikator kinerja satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) yang telah dipetakan mutu pendidikannya dan persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya dengan total anggaran Rp. 9,954,528,000, terealisasi sebesar Rp. 9,460,588,300 atau sebesar (95,04%). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai ketercapaian 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan. Dalam DIPA terdistribusi pada dua output/kegiatan, yaitu:
- Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya dengan total anggaran sebesar Rp. 1,771,004,000 dengan realisasi anggaran 1,515,512,500 (85.57%).
 - Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya dengan total anggaran sebesar Rp. 8,183,484,000 dengan realisasi anggaran sebesar 7,945,075,800 (97.09%).
- b. Indikator kinerja satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP terdiri dari 4 indikator kinerja kegiatan. Dalam DIPA terdistribusi pada dua output/kegiatan, yaitu:
- Satuan pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP dengan total anggaran sebesar Rp. 15,141,727,000 dengan realisasi anggaran 14,004,833,800 (92.49%).
 - Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP dengan total anggaran sebesar Rp. 20,335,457,000 dengan realisasi sebesar Rp. 19,781,280,900 (97.27%).
2. Sasaran Kegiatan “Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik” dengan total anggaran Rp. 36,877,146,000 dan realisasi mencapai 98.48% atau Rp. 36,317,858,150. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja “ Nilai Minimal SAKIP LPMP”. Dalam DIPA terdistribusi pada dua output/kegiatan, yaitu:
- a. Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan realisasi sebesar Rp. 3,344,578,600 (95.06%) dari total anggaran Rp. 3,518,276,000.
 - b. Layanan Internal dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32,973,279,550 (98.84%) dari total anggaran Rp. 33,358,870,000.

C. EFISIENSI ANGGARAN

LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2019 telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 10%. Perhitungan efisiensi tersebut berdasarkan kinerja anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sesuai PMK No. 249 Tahun 2011. Hasil efisiensi tersebut berasal dari penghematan belanja barang yang meliputi perjalanan dinas dan paket meeting, belanja jasa, dan belanja operasional lainnya serta sisa kontrak belanja modal.

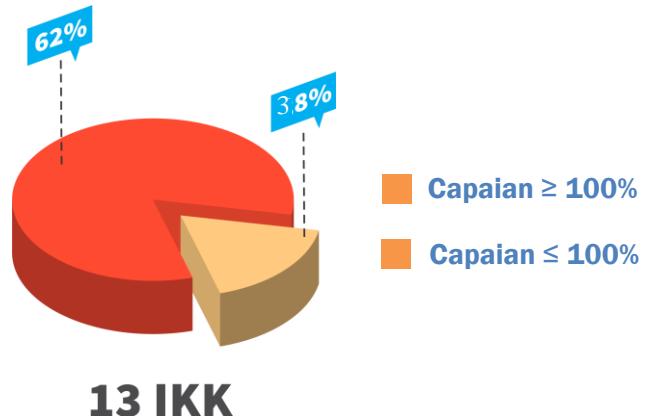
Pada tahun 2019, LPMP Sulawesi Selatan telah melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 2.054.157.000,- untuk mendukung capaian kinerja fasilitasi dan supervisi mutu satuan pendidikan berupa penambahan sasaran kegiatan supervisi mutu satuan pendidikan dari 7.303 sekolah menjadi 8.542 sekolah, pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana tindak lanjut hasil rekomendasi supervisi mutu, Bimbingan Teknis SPMI tingkat SMA/SMK, koordinasi pelaksanaan pengumpulan data mutu pendidikan, diskusi terpumpun pemetaan mutu pendidikan, dan bimbingan teknis rumah belajar.

Optimalisasi anggaran juga digunakan untuk kegiatan yang mendukung terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik berupa peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Bimbingan Teknis Pelayanan Prima, Workshop Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Workshop Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM.

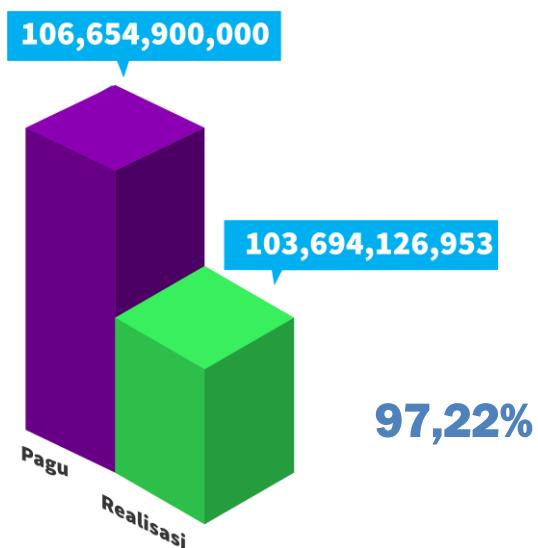
BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2019, LPMP Sulawesi Selatan berhasil melaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja. Dari 13 IKK, sebanyak lima IKK yang capaiannya memenuhi/melampaui target. Sementara delapan IKK lainnya belum memenuhi target. Meski demikian, semua IKK capaiannya berada diatas 90%. Grafik berikut ini menunjukkan pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan.

RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA



KINERJA ANGGARAN



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

1. Perlunya kajian dan evaluasi terhadap metode dan waktu pengumpulan data mutu satuan pendidikan. Aplikasi PMP yang digunakan dalam pengumpulan data mutu masih menjadi hambatan utama dalam pengumpulan data, meskipun aplikasi ini sudah digunakan sejak tahun 2016.
2. Belum satu pun satuan pendidikan di Propinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
3. Rendahnya komitmen satuan pendidikan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
4. Kualitas layanan publik.

Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, beberapa **fokus perbaikan** yang akan dilakukan kedepan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan permasalahan pemetaan mutu satuan pendidikan utamanya dengan satgas PMP pusat sebagai pengembang aplikasi PMP.
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam upaya pelaksaaan penjaminan mutu pendidikan antara lain melalui optimalisasi peran dan fungsi TPMPD dan melakukan pendampingan satuan pendidikan untuk mempercepat proses pemenuhan SNP.
3. Melakukan pendampingan satuan pendidikan dalam penerapan Sistem penjaminan mutu internal.
4. Peningkatan kualitas layanan publik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 **1. Perjanjian Kinerja**

 **2. Pengukuran Kinerja**

 **3. Lembar Review**

 **4. Laporan Pelaksanaan Program**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Sulawesi Selatan
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

A. TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

B. FUNGSI DAN TARGET CAPAIAN 2019

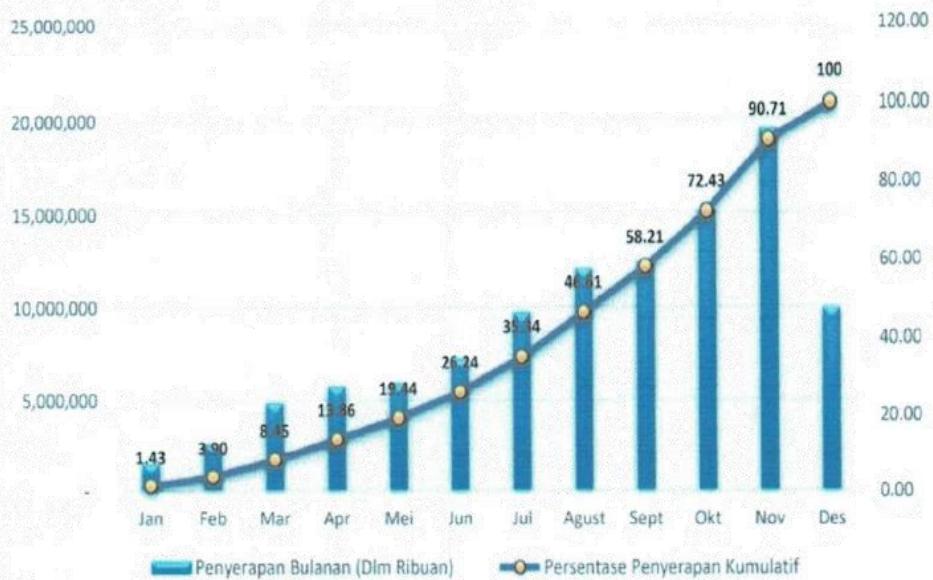
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan

NO.	FUNGSI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	1. Melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah 2. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah 3. Melakukan supervisi satuan	1. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh Jenjang Pendidikan	1. SD yang telah dipetakan mutunya 2. SD yang meningkat indeks efektivitasnya 3. SMP yang telah dipetakan mutunya 4. SMP yang meningkat indeks efektivitasnya 5. SMA yang telah dipetakan mutunya 6. SMA yang meningkat indeks efektivitasnya 7. SMK yang telah dipetakan mutunya 8. SMK yang meningkat indeks efektivitasnya (001). Satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya (004). Satuan pendidikan yang telah terverifikasi mutu pendidikannya 9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi	100% 95% 100% 95% 100% 95% 100% 95% 9.128 sekolah 9.128 Sekolah 80%	10,651,088,000 2,046,444,000 8,604,644,000 39,059,884,000

NO.	FUNGSI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
	pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan.		dalam pencapaian SNP		
	4. Melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan.		- SD yang telah disupervisi pencapaian SNP	5164 Sekolah	
			- SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	389 Sekolah	
			10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	
			- SMP yang telah disupervisi pencapaian SNP	1318 Sekolah	
			- SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	84 Sekolah	
	5. Melakukan Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional.		11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	
			- SMA yang telah disupervisi pencapaian SNP	467 Sekolah	
			- SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	3 Sekolah	
	6. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional.		12. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%	
			- SMK yang telah disupervisi pencapaian SNP	353 Sekolah	
			- SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	4 Sekolah	
			(002). Satuan pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	7.303 Sekolah	7,846,859,000
			(003). Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	480 Sekolah	21,213,025,000
2	7. Melaksanakan urusan administrasi LPMP	2. Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang baik	13. Nilai Minimal SAKIP LPMP	80	6,320,340,000
			(0970). Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	3,518,276,000
			(0951). Layanan Internal	1 Layanan	32,802,064,000

Jumlah alokasi anggaran LPMP Sulawesi Selatan sebesar Rp. 106.654.900.000 (Seratus enam milliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2019 LPMP Sulawesi Selatan



Komposisi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Penyerapan Bulanan (Dlm Ribuan)	1.526.003	2.634.356	4.852.759	5.769.984	5.961.296	7.252.475	9.705.519	12.019.511	12.371.870	15.166.206	19.496.360	9.908.161
Persentase Penyerapan Kumulatif	1.526.003	4.160.358	9.013.117	14.783.101	20.734.397	27.986.873	37.892.391	49.712.303	62.084.173	77.250.378	96.746.738.78	106.654.900
Persentase Penyerapan Kumulatif	143	390	845	13.86	19.44	26.24	35.34	46.61	58.21	72.43	90.71	100

C. EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku.



Makassar,
2019
Kepala LPMP Sulawesi Selatan

Abd. Halim Muhamarram
NIP 19650715 199403 1 002

Lampiran 2. Pengukuran Kinerja 2019

Sasaran/Indikator		Target		Realisasi			
		Fisik	Anggaran	Kinerja	% capaian	Anggaran	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan							
1	SD yang telah dipetakan mutunya output : SD yang terpetakan mutu pendidikannya	100% 6424 SD		100% 6413 SD	100%		
2	SD yang meningkat indeks efektivitasnya output : SD yang meningkat indeks efektifitasnya	95% 6388		91% 5783	95%		
3	SMP yang telah dipetakan mutunya output : SMP yang terpetakan mutu pendidikannya	100% 1648		99% 1628	99%		
4	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya output : SMP yang meningkat indeks efektifitasnya	95% 1615		94% 1520	99%		
5	SMA yang telah dipetakan mutunya output : SMA yang terpetakan mutu pendidikannya	100% 584		100% 557	100%	9,460,588,300	95%
6	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya output : SMA yang meningkat indeks efektifitasnya	95% 557		94% 524	99%		
7	SMK yang telah dipetakan mutunya output : SMK yang terpetakan mutu pendidikannya	100% 441		94% 408	94%		
8	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya output : SMK yang meningkat indeks efektifitasnya	95% 408		94.12% 384	99%		
(001). Satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya		9.128 Sekolah	1,771,044,000	9008 Sekolah	98.7%	1,515,512,500	85.57%
(004). Satuan pendidikan yang telah terverifikasi mutu pendidikannya		9.128 Sekolah	8,183,484,000	9008 Sekolah	98.7%	7,945,075,800	97.09%
9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : a. SD yang telah disupervisi pencapaian SNPnya b. SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	80% 5164 389		100% 5983 440	125%		
10	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP a. SMP yang telah disupervisi pencapaian SNPnya b. SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	80% 1318 84	35,477,184,000	125% 1555 117	125%	33,786,114,700	95.23%
11	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%		100%	125%		

Sasaran/Indikator		Target		Realisasi			
		Fisik	Anggaran	Kinerja	% capaian	Anggaran	%
12	a. SMA yang telah disupervisi pencapaian SNPnya	467		575			
	b. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	3		20			
	Percentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	80%		99%	122%		
	a. SMK yang telah disupervisi pencapaian SNPnya	353		429			
	b. SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	4		0			
(002). Satuan pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP		7.303 Sekolah	15,141,727,000	8542 Sekolah		14,004,833,800	92.49%
(003). Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP		480 Sekolah	20,335,457,000	577 Sekolah		19,781,280,900	97.27%
Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sulawesi Selatan yang Baik			36,877,146,000			36,317,858,150	98%
13	Nilai Minimal SAKIP LPMP Sulawesi Selatan	80	79,02	99%	99%		
(0970). Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	3,518,276,000	1 Layanan		3,344,578,600	95%
(0951). Layanan Internal		1 Layanan	33,358,870,000	1 Layanan		32,973,279,550	99%

Lampiran 3. Penyataan Evaluasi

**PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN EVALUASI INTERNAL
OLEH TIM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) LPMP SULSWESI SELATAN
TAHUN 2019**

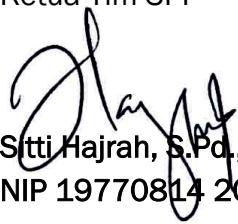
Kami telah melaksanakan evaluasi internal terhadap Laporan Kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen LPMP Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan evaluasi internal bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara, akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan evaluasi internal yang kami lakukan, Laporan Kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2019 sudah memberikan informasi kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Makassar, 28 Januari 2020

Ketua Tim SPI


Sitti Hajrah, S.Pd., M.Pd.
NIP 19770814 200112 2 001

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Bulan: Desember 2019

Format	: B.19	Dana DIPA	: Rp	106.654.900.000
Nama	: LPMP SULAWESI SELATAN	Realisasi	: Rp	103.694.126.953
Satker		Keuangan	:	97,22%
		Fisik	:	

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
417810	LPMP SULAWESI SELATAN					18.161.092.000	18.063.779.850	55.134.938.000	52.657.067.553	33.358.870.000	32.973.279.550	106.654.900.000	103.694.126.953	97,22	2.960.773.047
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH					18.161.092.000	18.063.779.850	55.134.938.000	52.657.067.553	33.358.870.000	32.973.279.550	106.654.900.000	103.694.126.953	97,22	2.960.773.047
03.06	Program Pendidikan Dasar dan Menengah					18.161.092.000	18.063.779.850	55.134.938.000	52.657.067.553	33.358.870.000	32.973.279.550	106.654.900.000	103.694.126.953	97,22	2.960.773.047
5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan					18.161.092.000	18.063.779.850	55.134.938.000	52.657.067.553	33.358.870.000	32.973.279.550	106.654.900.000	103.694.126.953	97,22	2.960.773.047
5630.001	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya	Sekolah	9.128	9.008	99,56	0	0	1.771.044.000	1.515.512.500	0	0	1.771.044.000	1.515.512.500	85,57	255.531.500
5630.001.002	Sekolah Terpetakan Mutu Pendidikan					0	0	1.771.044.000	1.515.512.500	0	0	1.771.044.000	1.515.512.500	85,57	255.531.500
051	Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu					0	0	248.480.000	225.024.000	0	0	248.480.000	225.024.000	90,56	23.456.000
051.A	Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu					0	0	248.480.000	225.024.000	0	0	248.480.000	225.024.000	90,56	23.456.000
052	Analisis Data Mutu					0	0	114.540.000	111.454.000	0	0	114.540.000	111.454.000	97,31	3.086.000
052.A	Analisis Data Mutu					0	0	114.540.000	111.454.000	0	0	114.540.000	111.454.000	97,31	3.086.000
053	Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu					0	0	264.916.000	263.414.800	0	0	264.916.000	263.414.800	99,43	1.501.200
053.A	Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu					0	0	264.916.000	263.414.800	0	0	264.916.000	263.414.800	99,43	1.501.200
054	Diseminasi Pemetaan Mutu					0	0	438.274.000	426.591.700	0	0	438.274.000	426.591.700	97,33	11.682.300
054.A	Diseminasi Pemetaan Mutu					0	0	438.274.000	426.591.700	0	0	438.274.000	426.591.700	97,33	11.682.300
055	Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	704.834.000	489.028.000	0	0	704.834.000	489.028.000	69,38	215.806.000
055.A	Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	704.834.000	489.028.000	0	0	704.834.000	489.028.000	69,38	215.806.000
5630.002	Satuan Pendidikan yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP	Sekolah	7.303	7.303	100,00	0	0	15.141.727.000	14.004.833.800	0	0	15.141.727.000	14.004.833.800	92,49	1.136.893.200
5630.002.001	Sekolah yang telah disupervisi dalam pencapaian SNP					0	0	15.141.727.000	14.004.833.800	0	0	15.141.727.000	14.004.833.800	92,49	1.136.893.200
051	Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	199.956.000	164.508.600	0	0	199.956.000	164.508.600	82,27	35.447.400
051.A	Workshop Penyusunan Bahan Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	199.956.000	164.508.600	0	0	199.956.000	164.508.600	82,27	35.447.400

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
052	Bimbingan Teknis Supervisi					0	0	3.824.310.000	3.222.062.700	0	0	3.824.310.000	3.222.062.700	84,25	602.247.300
052.A	Bimbingan Teknis Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan Tingkat Provinsi					0	0	99.518.000	81.367.000	0	0	99.518.000	81.367.000	81,76	18.151.000
052.B	Bimtek Supervisi Tingkat Kabupaten/Kota					0	0	3.379.768.000	2.856.130.700	0	0	3.379.768.000	2.856.130.700	84,51	523.637.300
052.C	Pendampingan Petugas LPMP ke Lokasi Bimtek Supervisi					0	0	345.024.000	284.565.000	0	0	345.024.000	284.565.000	82,48	60.459.000
053	Supervisi Satuan Pendidikan					0	0	9.647.726.000	9.222.753.400	0	0	9.647.726.000	9.222.753.400	95,60	424.972.600
053.A	Rapat Koordinasi Program Supervisi Mutu Pendidikan					0	0	198.554.000	197.357.000	0	0	198.554.000	197.357.000	99,40	1.197.000
053.B	Supervisi Mutu Satuan Pendidikan					0	0	9.203.760.000	8.784.433.400	0	0	9.203.760.000	8.784.433.400	95,44	419.326.600
053.C	Monitoring dan Evaluasi Program Supervisi Mutu Pendidikan					0	0	245.412.000	240.963.000	0	0	245.412.000	240.963.000	98,19	4.449.000
054	Analisis Supervisi Mutu Pendidikan					0	0	296.536.000	283.303.500	0	0	296.536.000	283.303.500	95,54	13.232.500
054.A	Workshop Analisis Data Supervisi Mutu Pendidikan					0	0	296.536.000	283.303.500	0	0	296.536.000	283.303.500	95,54	13.232.500
055	Diseminasi dan Rekomendasi Hasil Supervisi					0	0	1.173.199.000	1.112.205.600	0	0	1.173.199.000	1.112.205.600	94,80	60.993.400
055.A	Diseminasi dan Rekomendasi Hasil Supervisi					0	0	548.781.000	504.833.000	0	0	548.781.000	504.833.000	91,99	43.948.000
055.B	Bimtek Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Supervisi Mutu Pendidikan					0	0	624.418.000	607.372.600	0	0	624.418.000	607.372.600	97,27	17.045.400
5630.003	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	Sekolah	480	480	100,00	0	0	20.335.457.000	19.781.280.900	0	0	20.335.457.000	19.781.280.900	97,27	554.176.100
5630.003.001	Sekolah Yang Difasilitasi Melalui LPMP					0	0	17.866.667.000	17.639.756.800	0	0	17.866.667.000	17.639.756.800	98,73	226.910.200
051	Sosialisasi SPMI					0	0	367.604.000	357.061.000	0	0	367.604.000	357.061.000	97,13	10.543.000
051.A	Sosialisasi SPMI					0	0	367.604.000	357.061.000	0	0	367.604.000	357.061.000	97,13	10.543.000
052	Bimbingan Teknis SPMI					0	0	2.979.291.000	2.903.691.350	0	0	2.979.291.000	2.903.691.350	97,46	75.599.650
052.A	Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah SPMI Tingkat Provinsi					0	0	357.786.000	354.860.800	0	0	357.786.000	354.860.800	99,18	2.925.200
052.B	Bimtek SPMI Sekolah Model di Kabupaten/ Kota					0	0	1.590.750.000	1.536.775.600	0	0	1.590.750.000	1.536.775.600	96,61	53.974.400
052.C	Pendampingan Petugas LPMP ke Lokasi Bimtek SPMI kab/ kota					0	0	115.008.000	114.760.000	0	0	115.008.000	114.760.000	99,78	248
052.D	Bimtek Persiapan SPMI					0	0	628.200.000	619.105.100	0	0	628.200.000	619.105.100	98,55	9.094.900
052.E	Bimbingan Teknis SPMI Tkt SMA/SMK					0	0	287.547.000	278.189.850	0	0	287.547.000	278.189.850	96,75	9.357.150
053	Pendampingan Sekolah yang Difasilitasi oleh LPMP					0	0	10.767.996.000	10.729.260.000	0	0	10.767.996.000	10.729.260.000	99,64	38.736.000
053.A	Verifikasi Sekolah SPMI					0	0	117.508.000	114.170.000	0	0	117.508.000	114.170.000	97,16	3.338.000
053.B	Pendampingan Sekolah SPMI					0	0	9.600.000.000	9.600.000.000	0	0	9.600.000.000	9.600.000.000	100,00	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
053.C	Pendampingan sekolah SPMI oleh Fasnas/ Fasda					0	0	338.400.000	338.400.000	0	0	338.400.000	338.400.000	100,00	0
053.D	Workshop Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah					0	0	239.856.000	223.981.000	0	0	239.856.000	223.981.000	93,38	15.875.000
053.E	Validasi Model Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah					0	0	472.232.000	452.709.000	0	0	472.232.000	452.709.000	95,87	19.523.000
054	Pendampingan Sekolah yang difasilitasi oleh Direktorat					0	0	3.192.168.000	3.110.958.450	0	0	3.192.168.000	3.110.958.450	97,46	81.209.550
054.A	Pendampingan Implementasi SPMI Sekolah yang Difasilitasi Direktorat					0	0	934.240.000	928.308.000	0	0	934.240.000	928.308.000	99,37	5.932.000
054.AA	Koordinasi Pelaksanaan lomba, festival, dan olimpiade Jenjang SMP					0	0	62.160.000	51.530.000	0	0	62.160.000	51.530.000	82,90	10.630.000
054.AB	Pelaksanaan Gala Siswa Indonesia SMP (GSI)					0	0	163.048.000	148.025.100	0	0	163.048.000	148.025.100	90,79	15.022.900
054.AC	Training OSN Jenjang SMP					0	0	100.898.000	97.276.000	0	0	100.898.000	97.276.000	96,41	3.622.000
054.AD	Koordinasi Pelaksanaan Lomba, Festival dan Olimpiade Tingkat Provinsi					0	0	316.600.000	301.565.900	0	0	316.600.000	301.565.900	95,25	15.034.100
054.AE	Training Gala Siswa Indonesia (GSI)					0	0	75.670.000	69.022.150	0	0	75.670.000	69.022.150	91,21	6.647.850
054.BA	Koordinasi Pelaksanaan FLS2N Jenjang SD					0	0	77.025.000	77.012.000	0	0	77.025.000	77.012.000	99,98	13
054.BB	Koordinasi Pelaksanaan O2SN Jenjang SD					0	0	122.873.000	117.116.000	0	0	122.873.000	117.116.000	95,31	5.757.000
054.BC	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Sekolah Dasar					0	0	89.654.000	71.103.300	0	0	89.654.000	71.103.300	79,31	18.550.700
054.BD	Bantuan Pemerintah untuk Sekolah Dasar					0	0	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	1.250.000.000	100,00	0
055	Monitoring dan Evaluasi					0	0	559.608.000	538.786.000	0	0	559.608.000	538.786.000	96,28	20.822.000
055.A	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sekolah Model dan Rujukan					0	0	288.396.000	281.160.000	0	0	288.396.000	281.160.000	97,49	7.236.000
055.B	Monitoring dan Evaluasi SPME					0	0	271.212.000	257.626.000	0	0	271.212.000	257.626.000	94,99	13.586.000
5630.003.002	Sekolah yang Difasilitasi Melalui Kemitraan					0	0	2.468.790.000	2.141.524.100	0	0	2.468.790.000	2.141.524.100	86,74	327.265.900
052	Bimbingan Teknis SPME					0	0	1.058.291.000	1.020.831.000	0	0	1.058.291.000	1.020.831.000	96,46	37.460.000
052.A	Bimbingan Teknis SPME					0	0	478.731.000	467.675.000	0	0	478.731.000	467.675.000	97,69	11.056.000
052.B	Sinkronisasi Kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	579.560.000	553.156.000	0	0	579.560.000	553.156.000	95,44	26.404.000
053	Diseminasi Hasil					0	0	1.410.499.000	1.120.693.100	0	0	1.410.499.000	1.120.693.100	79,45	289.805.900
053.A	Diseminasi dan Seminar Hasil SPMI Tingkat Provinsi Sul-Sel					0	0	487.391.000	422.504.100	0	0	487.391.000	422.504.100	86,69	64.886.900
053.B	Diseminasi Hasil Pengembangan SPMI Tingkat Kab/Kota					0	0	923.108.000	698.189.000	0	0	923.108.000	698.189.000	75,63	224.919.000

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
5630.004	Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	Sekolah	9.128	0	0,00	0	0	8.183.484.000	7.945.075.800	0	0	8.183.484.000	7.945.075.800	97,09	238.408.200
5630.004.001	Sekolah yang telah diverifikasi mutu pendidikannya					0	0	8.183.484.000	7.945.075.800	0	0	8.183.484.000	7.945.075.800	97,09	238.408.200
051	Bimbingan Teknis Pengawas					0	0	2.363.180.000	2.244.729.200	0	0	2.363.180.000	2.244.729.200	94,99	118.450.800
051.A	Bimbingan Teknis Pengawas Pemetaan Mutu Pendidikan					0	0	2.363.180.000	2.244.729.200	0	0	2.363.180.000	2.244.729.200	94,99	118.450.800
052	Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data					0	0	129.068.000	116.214.900	0	0	129.068.000	116.214.900	90,04	12.853.100
052.A	Bimbingan Teknis Fasda Pengumpulan Data					0	0	129.068.000	116.214.900	0	0	129.068.000	116.214.900	90,04	12.853.100
053	Pelaksanaan Pengumpulan Data					0	0	4.683.264.000	4.617.985.700	0	0	4.683.264.000	4.617.985.700	98,61	65.278.300
053.A	Pelaksanaan Pengumpulan Data Pemetaan Mutu Pendidikan					0	0	4.436.634.000	4.385.652.700	0	0	4.436.634.000	4.385.652.700	98,85	50.981.300
053.B	Koordinasi Pelaksanaan Pengumpulan Data Mutu Pendidikan					0	0	246.630.000	232.333.000	0	0	246.630.000	232.333.000	94,20	14.297.000
054	Verifikasi dan Validasi					0	0	1.007.972.000	966.146.000	0	0	1.007.972.000	966.146.000	95,85	41.826.000
054.A	Verifikasi dan Validasi Data Pemetaan Mutu Pendidikan					0	0	570.840.000	553.660.400	0	0	570.840.000	553.660.400	96,99	17.179.600
054.B	Diskusi Terpumpun Peningkatan Mutu Pendidikan					0	0	437.132.000	412.485.600	0	0	437.132.000	412.485.600	94,36	24.646.400
5630.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100,00	0	0	0	33.358.870.000	32.973.279.550	33.358.870.000	32.973.279.550	98,84	385.590.450	
5630.951.001	Layanan Internal					0	0	0	33.358.870.000	32.973.279.550	33.358.870.000	32.973.279.550	98,84	385.590.450	
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor					0	0	0	377.950.000	377.900.000	377.950.000	377.900.000	99,99	50	
995.A	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor					0	0	0	377.950.000	377.900.000	377.950.000	377.900.000	99,99	50	
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran					0	0	0	690.032.000	676.616.850	690.032.000	676.616.850	98,06	13.415.150	
997.A	Tanpa Sub Komponen					0	0	0	690.032.000	676.616.850	690.032.000	676.616.850	98,06	13.415.150	
998	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan					0	0	0	32.290.888.000	31.918.762.700	32.290.888.000	31.918.762.700	98,85	372.125.300	
998.A	Renovasi Gedung					0	0	0	31.598.182.000	31.226.056.700	31.598.182.000	31.226.056.700	98,82	372.125.300	
998.B	Renovasi Gedung Tahun 2018					0	0	0	692.706.000	692.706.000	692.706.000	692.706.000	100,00	0	
5630.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100,00	0	0	3.518.276.000	3.344.578.600	0	0	3.518.276.000	3.344.578.600	95,06	173.697.400
5630.970.001	Layanan Dukungan Manajemen Satker					0	0	3.518.276.000	3.344.578.600	0	0	3.518.276.000	3.344.578.600	95,06	173.697.400
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran					0	0	547.497.000	535.906.000	0	0	547.497.000	535.906.000	97,88	11.591.000
051.A	Pemantapan Program Kerja					0	0	277.240.000	275.300.700	0	0	277.240.000	275.300.700	99,30	1.939.300
051.B	Penyusunan RKAAL					0	0	114.240.000	109.540.000	0	0	114.240.000	109.540.000	95,89	4.700.000
051.C	Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024					0	0	91.569.000	87.569.300	0	0	91.569.000	87.569.300	95,63	3.999.700

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
051.D	Benchmarking Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)					0	0	64.448.000	63.496.000	0	0	64.448.000	63.496.000	98,52	952
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi					0	0	739.969.000	686.027.750	0	0	739.969.000	686.027.750	92,71	53.941.250
052.A	Pemantauan dan Evaluasi Program Prioritas Dikdasmen					0	0	213.416.000	209.021.350	0	0	213.416.000	209.021.350	97,94	4.394.650
052.B	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran					0	0	142.800.000	106.557.750	0	0	142.800.000	106.557.750	74,62	36.242.250
052.C	Penyusunan LAKIP					0	0	207.043.000	200.179.350	0	0	207.043.000	200.179.350	96,68	6.863.650
052.D	Reviu pelaksanaan Program dan Kegiatan Lembaga oleh Tim SPI					0	0	29.000.000	24.201.200	0	0	29.000.000	24.201.200	83,45	4.798.800
052.E	Bimbingan Teknis SAKIP					0	0	117.738.000	116.596.100	0	0	117.738.000	116.596.100	99,03	1.141.900
052.F	Benchmarking SPI dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)					0	0	29.972.000	29.472.000	0	0	29.972.000	29.472.000	98,33	500
053	Pengelolaan keuangan dan perpendaharaan					0	0	129.315.000	120.777.300	0	0	129.315.000	120.777.300	93,40	8.537.700
053.A	Penyusunan Laporan Keuangan					0	0	43.340.000	42.480.900	0	0	43.340.000	42.480.900	98,02	859.1
053.B	Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)					0	0	45.020.000	37.850.400	0	0	45.020.000	37.850.400	84,07	7.169.600
053.C	Benchmarking Pengelolaan Keuangan					0	0	40.955.000	40.446.000	0	0	40.955.000	40.446.000	98,76	509
054	Pengelolaan kepegawaian					0	0	458.206.000	452.411.600	0	0	458.206.000	452.411.600	98,74	5.794.400
054.C	IHT Pegawai LPMP					0	0	361.038.000	356.138.000	0	0	361.038.000	356.138.000	98,64	4.900.000
054.E	Bimtek Penyusunan Instrumen bagi Jabatan Analis dan Penyusun					0	0	97.168.000	96.273.600	0	0	97.168.000	96.273.600	99,08	894.4
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan					0	0	1.643.289.000	1.549.455.950	0	0	1.643.289.000	1.549.455.950	94,29	93.833.050
055.A	Workshop Penatausahaan Barang Milik Negara					0	0	126.848.000	121.944.600	0	0	126.848.000	121.944.600	96,13	4.903.400
055.AA	Reviu Prosedur Operasional Standar dan Standar Pelayanan (SP) LPMP SulSel					0	0	86.433.000	84.378.350	0	0	86.433.000	84.378.350	97,62	2.054.650
055.AB	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Prosedur Operasional Standar dan Standar Pelayanan					0	0	112.358.000	109.614.000	0	0	112.358.000	109.614.000	97,56	2.744.000
055.AC	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima					0	0	82.490.000	71.545.800	0	0	82.490.000	71.545.800	86,73	10.944.200
055.AD	Penyusunan Profil LPMP					0	0	159.730.000	136.112.100	0	0	159.730.000	136.112.100	85,21	23.617.900
055.AE	Pelayanan Data dan Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	120.160.000	120.078.000	0	0	120.160.000	120.078.000	99,93	82
055.AF	Pengelolaan Jurnal dan Buletin					0	0	53.600.000	53.348.400	0	0	53.600.000	53.348.400	99,53	251.6
055.AC	Pengelolaan DUPAK Guru					0	0	39.500.000	38.993.200	0	0	39.500.000	38.993.200	98,72	506.8
055.AH	Benchmarking Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa					0	0	28.192.000	27.692.000	0	0	28.192.000	27.692.000	98,23	500

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total			
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
055.B	Koordinasi Klaster LPMP Se-Indonesia Timur					0	0	132.943.000	132.368.700	0	0	132.943.000	132.368.700	99,57	574.3
055.C	Pengelolaan Barang Milik Negara					0	0	208.552.000	173.005.500	0	0	208.552.000	173.005.500	82,96	35.546.500
055.D	Perayaan Hari Pendidikan Nasional					0	0	149.040.000	149.016.100	0	0	149.040.000	149.016.100	99,98	23.9
055.E	Workshop Pembangunan Zi Menuju WBK/WBBM					0	0	93.993.000	85.682.600	0	0	93.993.000	85.682.600	91,16	8.310.400
055.F	Diskusi Terpumpun Program Penjaminan Mutu Pendidikan					0	0	160.288.000	157.921.400	0	0	160.288.000	157.921.400	98,52	2.366.600
055.G	Bimbingan Teknis Rumah Belajar					0	0	61.938.000	61.031.200	0	0	61.938.000	61.031.200	98,54	906.8
055.H	Benchmarking Pengelolaan Gedung Negara					0	0	27.224.000	26.724.000	0	0	27.224.000	26.724.000	98,16	500
5630.994	Layanan Perkantoran	Layanan	12	11	91,67	18.161.092.000	18.063.779.850	6.184.950.000	6.065.785.953	0	0	24.346.042.000	24.129.565.803	99,11	216.476.197
5630.994.001	Layanan Perkantoran					18.161.092.000	18.063.779.850	6.184.950.000	6.065.785.953	0	0	24.346.042.000	24.129.565.803	99,11	216.476.197
001	Gaji dan Tunjangan					18.161.092.000	18.063.779.850	0	0	0	0	18.161.092.000	18.063.779.850	99,46	97.312.150
001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					9.396.205.000	9.319.710.833	0	0	0	0	9.396.205.000	9.319.710.833	99,19	76.494.167
001.B	Belanja Tunjangan Kinerja					8.764.887.000	8.744.069.017	0	0	0	0	8.764.887.000	8.744.069.017	99,76	20.817.983
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					0	0	6.184.950.000	6.065.785.953	0	0	6.184.950.000	6.065.785.953	98,07	119.164.047
002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran					0	0	1.690.750.000	1.666.852.750	0	0	1.690.750.000	1.666.852.750	98,59	23.897.250
002.B	Langganan Daya dan Jasa					0	0	1.092.000.000	1.004.509.242	0	0	1.092.000.000	1.004.509.242	91,99	87.490.758
002.C	Pemeliharaan Kantor					0	0	1.164.224.000	1.163.800.801	0	0	1.164.224.000	1.163.800.801	99,96	423.199
002.D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Perkantoran					0	0	2.237.976.000	2.230.623.160	0	0	2.237.976.000	2.230.623.160	99,67	7.352.840
	T O T A L					18.161.092.000	18.063.779.850	55.134.938.000	52.657.067.553	33.358.870.000	32.973.279.550	106.654.900.000	103.694.126.953	97,22	2.960.773.047

